

RENCANA STRATEGIS

TAHUN 2025 - 2029

Balai Pelaksana Penyediaan
Perumahan dan Kawasan Permukiman
Sumatera I



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya, Rencana Strategis (Renstra) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera I Tahun 2025–2029 dapat disusun dengan baik.

Renstra ini disusun sebagai tindak lanjut atas amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, serta sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029. Penyusunan dokumen ini juga merupakan tindak lanjut Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman No. 15 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Kementerian Perumahan Dan Kawasan Permukiman. Penyusunan dokumen memperhatikan penjenjangan kinerja dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman berdasarkan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman No. 14 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Kementerian Perumahan Dan Kawasan Permukiman Tahun 2025-2029, serta kondisi aktual, potensi, serta permasalahan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman di Aceh, termasuk *backlog* kepemilikan dan rumah tidak layak huni (RTLH), ketimpangan infrastruktur, urbanisasi, serta kerentanan terhadap bencana.

Dokumen ini merupakan pedoman arah kebijakan, strategi, serta program kerja yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun ke depan, yang memuat tujuan dan sasaran strategis Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera I yang selaras dengan Rencana Strategis Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2025-2029. Selain itu, Renstra ini juga merumuskan arah kebijakan dan strategi, program dan kegiatan, kerangka kelembagaan, dan kerangka pendanaan yang akan menjadi acuan dalam penyelenggaraan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman di wilayah kerja BP3KP Sumatera I selama periode 2025–2029.

Kami menyadari bahwa dokumen Renstra ini masih memerlukan penyempurnaan seiring dengan dinamika kebijakan dan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, masukan dan saran dari berbagai pihak sangat diharapkan demi peningkatan kualitas perencanaan dan pelaksanaan program perumahan dan kawasan permukiman di masa mendatang.

Akhir kata, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan dokumen ini, baik berupa data, masukan, maupun dukungan teknis. Semoga Dokumen Renstra ini dapat menjadi acuan yang bermanfaat bagi seluruh pemangku kepentingan dalam upaya bersama meningkatkan kualitas perumahan dan kawasan permukiman di Provinsi Aceh.

Banda Aceh, 16 Februari 2026

Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan
dan Kawasan Permukiman Sumatera I



Iswanto
Iswanto, S.T., M.Si.

NIP. 19711106 199703 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	2
1.1. Kondisi Umum.....	2
1.1.1. Landasan Konstitusional.....	2
1.1.2. Capaian Pembangunan Periode Sebelumnya	14
1.2. Potensi dan Permasalahan	18
1.2.1. Potensi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	18
1.2.2. Permasalahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman ..	19
1.2.3. Analisis Berdasarkan Potensi dan Permasalahan.....	21
BAB II TUJUAN DAN SASARAN	23
2.1. Tujuan Balai	23
2.2. Sasaran Program Balai	23
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	27
3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Unit Organisasi.....	27
3.1.1. Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman.....	27
3.1.2. Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan	28
3.1.3. Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan	30
3.1.4. Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko (TKPR).....	31
3.1.5. Arah Kebijakan dan Strategi Sekretariat Jenderal.....	32
3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera I	34
3.3. Kerangka Kelembagaan.....	36
3.4. Sumber Daya Manusia.....	40

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	45
4.1. Target Kinerja	45
4.2. Kerangka Pendanaan.....	47
BAB V PENUTUP	49
LAMPIRAN.....	51

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Backlog Kepemilikan dan RTLH Provinsi Aceh (DTSEN).....	5
Tabel 1.2. Persentase Rumah Tangga berdasarkan Status Kepemilikan Bangunan Tempat Tinggal tahun 2024.....	6
Tabel 1.3. Persentase Rumah Tangga yang Menempati Bangunan Tempat Tinggal Milik Sendiri Menurut Jenis Bukti Kepemilikan Tanah Bangunan Tempat Tinggal di Aceh, 2024	7
Tabel 1.4. Distribusi Persentase Rumah Tangga berdasarkan Luas Lantai	8
Tabel 1.5. Persentase Rumah Tangga berdasarkan Sumber Air Utama untuk Minum.....	8
Tabel 1.6. Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sumber Air Minum Layak	9
Tabel 1.7. Persentase Rumah Tangga berdasarkan Kepemilikan serta Penggunaan Fasilitas Tempat Buang Air Besar	10
Tabel 1.8. Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Fasilitas Tempat Buang Air Besar berdasarkan Jenis Kloset yang digunakan.....	10
Tabel 1.9. Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak.....	11
Tabel 1.10. Persentase Rumah Tangga berdasarkan Jenis Atap Terluas	11
Tabel 1.11. Persentase Rumah Tangga berdasarkan Jenis Dinding	12
Tabel 1.12. Persentase Rumah Tangga berdasarkan Jenis Lantai	12
Tabel 1.13. Persentase Rumah Tangga berdasarkan Jenis Sumber Penerangan	13
Tabel 1.14. Persentase Rumah Tangga berdasarkan Bahan Bakar/Sumber Energi untuk Memasak	13
Tabel 1.15. Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2020 - 2024	16
Tabel 1.16. Persentase Capaian Periode Sebelumnya	17
Tabel 1.17. Analisis SWOT	21
Tabel 3.1. Persebaran Pegawai BP3KP Sumatera I.....	40
Tabel 3.2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan Terakhir	40
Tabel 3.3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat / Golongan	41
Tabel 3.4. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan.....	41
Tabel 4.1. Rekapitulasi Target Kinerja BP3KP Sumatera I.....	45
Tabel 4.2. Rekapitulasi Kerangka Pendanaan BP3KP Sumatera I	47

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Peta Wilayah Kerja BP3KP Sumatera I	4
Gambar 1.2. Rumoh Aceh	5
Gambar 1.3. Capaian Kinerja BP2P Sumatera I dalam Persentase	17
Gambar 1.4. Capaian Kinerja Satker Penyediaan Perumahan Prov. Aceh dalam Persentase	18
Gambar 2.1. Pohon Kinerja BP3KP Sumatera I	25
Gambar 3.1. Diagram SOTK UPT Kementerian PKP	37
Gambar 3.2. Struktur Organisasi BP3KP Sumatera I	38
Gambar 3.3. Diagram Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin.....	40
Gambar 3.4. Peta Jabatan BP3KP Sumatera I	43

The background of the entire page is a light blue map pattern with various street lines and shapes. A white rectangular box is positioned in the upper left quadrant, containing the title text. To the left of the text, there is a vertical dashed line.

BAB I

PENDAHULUAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Kondisi Umum

1.1.1. Landasan Konstitusional

Tempat tinggal yang layak merupakan salah satu hak dasar bagi setiap warga negara Indonesia. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28H ayat (1) yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”

Prinsip tersebut juga diperkuat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, khususnya Pasal 40 yang menegaskan bahwa “Setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak.” Artinya, rumah bukan hanya bangunan untuk berlindung, tetapi bagian dari hak asasi yang harus dijamin oleh negara bagi seluruh rakyatnya.

Dalam perjalanan pembangunan nasional, penyediaan perumahan dan pengembangan kawasan permukiman memiliki peran strategis dalam membangun kualitas hidup masyarakat Indonesia. Pembangunan perumahan yang terencana dan kawasan permukiman yang tertata tidak hanya membantu mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial, tetapi juga memperkuat rasa kebersamaan di tengah pesatnya urbanisasi dan pertumbuhan penduduk. Lebih dari sekadar membangun fisik rumah, negara berkomitmen untuk memastikan setiap warga memiliki kesempatan yang sama untuk hidup di lingkungan yang aman, sehat, dan berkelanjutan. Pemenuhan hak atas hunian yang layak menjadi pondasi penting dalam mewujudkan kesejahteraan sosial dan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) merupakan salah satu Kementerian Negara dalam Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024–2029. Kementerian PKP memiliki tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan suburusan pemerintahan kawasan permukiman yang merupakan lingkup urusan

pemerintahan di bidang pekerjaan umum untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman No. 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian PKP, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disingkat BP3KP adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang melaksanakan tugas teknis operasional di bidang penyediaan perumahan dan kawasan permukiman. BP3KP di Kementerian PKP berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Kawasan Permukiman. Secara teknis, BP3KP berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan dan Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan dalam hal pelaksanaan tugas penyelenggaraan pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan di perdesaan dan perkotaan. Pembinaan terhadap BP3KP dilaksanakan oleh:

- a. Sekretaris Jenderal, mencakup bidang tata usaha, urusan umum dan rumah tangga, layanan hukum, sumber daya manusia, penataan organisasi dan tata laksana, pengelolaan anggaran dan aset, serta kearsipan untuk mendukung operasional BP3KP.
- b. Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko, mencakup pembinaan reformasi birokrasi dan pembangunan zona integritas, penerapan sistem pengendalian intern dan manajemen risiko, serta pengendalian terhadap praktik korupsi dan penyuapan.

Dalam rangka mempermudah koordinasi serta mendorong pelaksanaan pembangunan perumahan dalam Program Tiga Juta Rumah di Indonesia, berdasarkan Permen PKP No. 1 Tahun 2025 Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman telah menetapkan 19 lokasi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP), termasuk diantaranya Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera I untuk wilayah kerja Provinsi Aceh.

Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera I merupakan hasil proses reorganisasi dan transformasi kelembagaan dari unit sebelumnya, yaitu Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera I yang berada di bawah Direktorat Jenderal Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Perubahan tersebut dilaksanakan seiring dengan dibentuknya Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) melalui Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2024. Seiring perubahan tersebut,

tiga bagian utama, yaitu *Seuramoë Keuë* (serambi depan), *Seuramoë Teungoh* (serambi tengah), dan *Seuramoë Likôt* (serambi belakang), serta tambahan *Rumoh Dapu* (dapur). Arsitektur tradisional ini tidak hanya mencerminkan kearifan lokal dalam menghadapi kondisi geografis, tetapi juga mengandung filosofi adat dan syariat Islam yang menjadi identitas masyarakat Aceh.



Gambar 1.2. Rumoh Aceh

Permasalahan utama dalam pemenuhan kebutuhan tempat tinggal di Provinsi Aceh antara lain karena terbatasnya lahan perumahan dan tingginya harga tanah dan harga rumah, yang menyebabkan *backlog* kepemilikan dan *backlog* rumah tidak layak huni (RTLH) di Provinsi Aceh masih cukup tinggi, Berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), berikut jumlah *backlog* kepemilikan dan rumah tidak layak huni di Provinsi Aceh.

Tabel 1.1. Backlog Kepemilikan dan RTLH Provinsi Aceh (DTSEN)

No	Kabupaten / Kota	Backlog Kepemilikan	Backlog Kualitas	Total
1	Kab. Simeulue	3.271	6.990	10.261
2	Kab. Aceh Singkil	6.095	8.536	14.631
3	Kab. Aceh Selatan	13.004	17.683	30.687
4	Kab. Aceh Tenggara	11.645	15.575	27.220
5	Kab. Aceh Timur	17.447	35.538	52.985
6	Kab. Aceh Tengah	6.513	13.700	20.213

No	Kabupaten / Kota	Backlog Kepemilikan	Backlog Kualitas	Total
7	Kab. Aceh Barat	8.729	7.160	15.889
8	Kab. Aceh Besar	23.871	13.221	37.092
9	Kab. Pidie	32.092	33.736	65.828
10	Kab. Bireuen	22.440	19.925	42.365
11	Kab. Aceh Utara	25.436	42.764	68.200
12	Kab. Aceh Barat Daya	10.252	10.526	20.778
13	Kab. Gayo Lues	3.254	11.272	14.526
14	Kab. Aceh Tamiang	15.717	13.171	28.888
15	Kab. Nagan Raya	7.052	9.610	16.662
16	Kab. Aceh Jaya	3.379	6.227	9.606
17	Kab. Bener Meriah	3.729	7.653	11.382
18	Kab. Pidie Jaya	9.209	9.729	18.938
19	Kota Banda Aceh	14.984	1.989	16.973
20	Kota Sabang	2.260	1.094	3.354
21	Kota Langsa	11.447	4.490	15.937
22	Kota Lhokseumawe	10.969	5.029	15.998
23	Kota Subulussalam	3.908	12.917	16.825
Total		266.703	308.535	575.238

Berdasarkan DTSEN, *backlog* kepemilikan rumah di Provinsi Aceh masih tergolong cukup tinggi yaitu sebesar 266.703. Secara detail, persentase status kepemilikan rumah per Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.2. Persentase Rumah Tangga berdasarkan Status Kepemilikan Bangunan Tempat Tinggal tahun 2024

No	Kabupaten / Kota	Milik Sendiri	Kontrak/ Sewa	Bebas Sewa	Dinas	Lainnya
1	Simeulue	92,19	1,62	5,64	0,55	0,00
2	Aceh Singkil	87,64	3,06	7,10	2,19	0,00
3	Aceh Selatan	91,59	0,94	7,47	0,00	0,00
4	Aceh Tenggara	78,69	4,59	16,28	0,45	0,00
5	Aceh Timur	88,98	2,02	7,69	1,31	0,00
6	Aceh Tengah	84,24	7,41	8,31	0,03	0,00
7	Aceh Barat	87,24	4,62	8,14	0,00	0,00
8	Aceh Besar	83,66	2,88	13,45	0,00	0,00
9	Pidie	80,95	0,66	18,39	0,00	0,00
10	Bireuen	91,23	2,20	6,22	0,35	0,00
11	Aceh Utara	92,66	1,03	5,45	0,86	0,00
12	Aceh Barat Daya	91,59	2,45	4,71	1,25	0,00
13	Gayo Lues	83,49	4,83	10,00	1,69	0,00
14	Aceh Tamiang	83,88	3,26	7,82	5,04	0,00
15	Nagan Raya	89,11	1,90	6,78	2,21	0,00
16	Aceh Jaya	89,41	2,38	7,90	0,31	0,00
17	Bener Meriah	89,00	3,45	7,37	0,18	0,00
18	Pidie Jaya	89,69	0,27	9,80	0,24	0,00

No	Kabupaten / Kota	Milik Sendiri	Kontrak/ Sewa	Bebas Sewa	Dinas	Lainnya
19	Kota Banda Aceh	57,42	23,44	13,98	5,17	0,00
20	Kota Sabang	73,30	5,36	15,00	6,34	0,00
21	Kota Langsa	74,28	8,20	14,88	2,65	0,00
22	Kota Lhokseumawe	80,79	8,49	10,72	0,00	0,00
23	Kota Subulussalam	88,04	4,49	6,49	0,99	0,00
Total		85,14	4,00	9,71	1,15	0,00

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024, persentase rumah tangga yang menempati rumah milik sendiri di Provinsi Aceh sebesar 85,14 persen. Dari total tersebut, hanya 64,38 persen rumah tangga yang memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama anggota rumah tangga (ART).

Tabel 1.3. Persentase Rumah Tangga yang Menempati Bangunan Tempat Tinggal Milik Sendiri Menurut Jenis Bukti Kepemilikan Tanah Bangunan Tempat Tinggal di Aceh, 2024

Jenis Bukti Kepemilikan Tanah Bangunan Tempat Tinggal	Persentase
SHM atas nama ART	64,38
Tidak punya	15,23
Surat bukti lainnya	15,3
SHM bukan atas nama ART dengan perjanjian	2,29
Sertifikat selain SHM	1,54
SHM bukan atas nama ART tanpa perjanjian	1,29

Meskipun angka ini paling tinggi diantara jenis bukti kepemilikan tanah bangunan tempat tinggal, namun masih ada 15,23 persen rumah tangga yang menempati rumah milik sendiri tetapi tidak memiliki bukti apapun. Angka ini mengindikasikan masih ada 15 hingga 16 dari 100 rumah tangga yang belum aman terkait bukti kepemilikan tanah bangunan tempat tinggal yang ditempati karena tidak memiliki bukti apapun.

Berdasarkan DTSEN, *backlog* rumah tidak layak huni (RTLH) di Provinsi Aceh juga tergolong cukup tinggi yaitu sebesar 308.535. Rumah tangga dikatakan menempati rumah layak huni apabila memenuhi empat kriteria yaitu:

a. Kecukupan luas tempat tinggal (*sufficient living space*)

Luas lantai per kapita suatu rumah tangga diperoleh dari penghitungan luas lantai (m^2) dibagi dengan jumlah anggota rumah tangga. Dari segi kecukupan luas lantai, suatu rumah dikatakan memenuhi syarat kelayakan huni jika mencukupi kebutuhan minimum luas bangunan per orang yaitu minimal $7,2 m^2$ per kapita. Jika kurang dari ukuran yang ditentukan, maka rumah disebut tidak layak huni karena

terlalu sempit. Data distribusi persentase rumah tangga berdasarkan luas lantai per Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.4. Distribusi Persentase Rumah Tangga berdasarkan Luas Lantai

No	Kabupaten / Kota	Luas Lantai < 19	Luas Lantai 20 - 49	Luas Lantai 50 - 99	Luas Lantai 100 - 149	Luas Lantai > 150
1	Simeulue	3,00	34,40	49,15	8,99	4,46
2	Aceh Singkil	1,25	30,83	51,67	9,92	6,33
3	Aceh Selatan	1,04	32,12	42,72	15,07	9,04
4	Aceh Tenggara	1,35	35,24	45,61	10,73	7,07
5	Aceh Timur	1,32	49,87	40,00	7,84	0,97
6	Aceh Tengah	0,94	26,82	46,74	18,50	6,99
7	Aceh Barat	0,78	22,45	45,36	20,19	11,22
8	Aceh Besar	0,73	38,19	40,20	14,43	6,44
9	Pidie	1,31	37,89	46,92	11,08	2,80
10	Bireuen	1,17	30,17	46,53	11,60	10,53
11	Aceh Utara	0,52	57,37	36,46	4,66	0,98
12	Aceh Barat Daya	1,03	20,54	50,14	22,03	6,26
13	Gayo Lues	5,10	36,16	36,23	14,37	8,14
14	Aceh Tamiang	2,21	38,86	44,85	11,01	3,06
15	Nagan Raya	0,21	31,48	44,05	14,94	9,32
16	Aceh Jaya	1,48	46,62	40,96	7,00	3,94
17	Bener Meriah	1,48	22,09	42,03	24,97	9,42
18	Pidie Jaya	0,66	50,03	40,67	6,17	2,46
19	Kota Banda Aceh	3,09	38,61	25,01	15,81	17,48
20	Kota Sabang	4,57	43,74	36,73	9,88	5,08
21	Kota Langsa	2,37	30,15	45,21	12,60	9,67
22	Kota Lhokseumawe	0,95	35,89	38,89	14,10	10,17
23	Kota Subulussalam	0,26	30,08	49,12	14,92	5,61

b. Memiliki akses terhadap sumber air minum layak

Sumber air minum dikatakan layak jika rumah tangga memiliki sumber air minum utama berupa air terlindungi, yaitu: leding, sumur bor/pompa, sumur terlindung, mata air terlindung, atau air hujan. Jika sumber air minum utama rumah tangga bersifat tidak berkelanjutan (tidak *sustainable*) yaitu air kemasan bermerek atau air isi ulang, rumah tangga perlu memiliki sumber air mandi/cuci/dll berupa air terlindungi agar dapat dikatakan memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.

Tabel 1.5. Persentase Rumah Tangga berdasarkan Sumber Air Utama untuk Minum

Tahun	Air kemasan/ Isi ulang	Leding	Sumur bor/ pompa	Sumur terlindung	Mata air terlindung	Lainnya
2022	40,96	7,63	9,59	26,56	8,11	7,15
2023	43,52	7,79	9,19	24,58	8,06	6,85

Tahun	Air kemasan/ Isi ulang	Leding	Sumur bor/ pompa	Sumur terlindung	Mata air terlindung	Lainnya
2024	46,23	9,57	8,36	22,58	7,20	6,05

Menurut data BPS tahun 2024, rumah tangga di Aceh lebih banyak mengonsumsi air kemasan/isi ulang sebagai sumber air utama untuk minum yaitu sebesar 46,23 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian besar rumah tangga masih mengonsumsi air yang diperoleh secara swadaya atau atas upaya/biaya sendiri. Data distribusi persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sumber air minum layak per Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.6. Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sumber Air Minum Layak

No	Kabupaten / Kota	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sumber Air Minum Layak
1	Simeulue	83,69
2	Aceh Singkil	84,37
3	Aceh Selatan	77,45
4	Aceh Tenggara	93,8
5	Aceh Timur	82,85
6	Aceh Tengah	97,1
7	Aceh Barat	95,49
8	Aceh Besar	90,38
9	Pidie	89,22
10	Bireuen	94,79
11	Aceh Utara	91,25
12	Aceh Barat Daya	89,11
13	Gayo Lues	86,19
14	Aceh Tamiang	83,82
15	Nagan Raya	90,49
16	Aceh Jaya	83,1
17	Bener Meriah	88,48
18	Pidie Jaya	90,38
19	Kota Banda Aceh	95,66
20	Kota Sabang	92,55
21	Kota Langsa	98,46
22	Kota Lhokseumawe	98,69
23	Kota Subulussalam	56,02

c. Memiliki akses terhadap sanitasi layak

Sanitasi merupakan salah satu komponen yang ikut mempengaruhi kondisi kesehatan masyarakat dan lingkungan yang secara tidak langsung juga turut berkontribusi terhadap kondisi kesejahteraan masyarakat.

Tabel 1.7. Persentase Rumah Tangga berdasarkan Kepemilikan serta Penggunaan Fasilitas Tempat Buang Air Besar

Tahun	Ada, digunakan sendiri	Ada, digunakan bersama	Ada, MCK komunal	Ada, MCK umum	Ada, ART tidak menggunakan	Tidak ada
2022	80,34	3,44	0,34	2,46	0,37	13,04
2023	83,74	4,98	0,22	2,07	0,16	8,84
2024	86,39	3,98	0,14	1,71	0,27	7,50

Pada tahun 2024, terdapat 7 hingga 8 dari 100 rumah tangga di Aceh tidak menggunakan atau tidak punya fasilitas tempat buang air besar. Hal ini disebabkan karena rumah tangga tersebut lebih memilih sungai atau kebun sebagai tempat buang air besarnya.

Jenis kloset yang digunakan rumah tangga juga akan berpengaruh terhadap kondisi kesehatan lingkungan sekitar dan risiko penularan penyakit, khususnya penyakit saluran pencernaan yang disebabkan pencemaran air oleh limbah/kotoran. Jenis kloset plengsengan dan cemplung/cubluk merupakan jenis kloset yang kurang memenuhi syarat kesehatan karena dapat mencemarkan lingkungan perumahan. Sedangkan jenis kloset leher angsa merupakan jenis kloset yang terbaik dan memenuhi syarat kesehatan.

Tabel 1.8. Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Fasilitas Tempat Buang Air Besar berdasarkan Jenis Kloset yang digunakan

Tahun	Jenis Kloset		
	Leher Angsa	Plengsengan	Cemplung/ Cubluk
2022	94,90	2,64	2,46
2023	97,01	0,69	2,30
2024	97,50	1,00	1,50

Pada tahun 2024 rumah tangga di Provinsi Aceh yang menggunakan jenis kloset leher angsa mencapai 90 persen lebih, namun capaian ini masih perlu ditingkatkan agar tercipta kesehatan lingkungan yang lebih baik. Masih terdapat 2,5 persen rumah tangga yang tidak menggunakan kloset leher angsa, yang terdiri dari 1 persen menggunakan kloset plengsengan dan 1,5 persen menggunakan cemplung/cubluk. Data distribusi persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak per Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.9. Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak

No	Kabupaten / Kota	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak
1	Simeulue	70,21
2	Aceh Singkil	78,92
3	Aceh Selatan	70,83
4	Aceh Tenggara	62,88
5	Aceh Timur	69,06
6	Aceh Tengah	89,69
7	Aceh Barat	88,39
8	Aceh Besar	83,49
9	Pidie	54,68
10	Bireuen	85,39
11	Aceh Utara	78,92
12	Aceh Barat Daya	65,94
13	Gayo Lues	46,33
14	Aceh Tamiang	82,74
15	Nagan Raya	79,97
16	Aceh Jaya	78,05
17	Bener Meriah	81,56
18	Pidie Jaya	73,49
19	Kota Banda Aceh	96,88
20	Kota Sabang	89,52
21	Kota Langsa	91,92
22	Kota Lhokseumawe	90,27
23	Kota Subulussalam	72,46

d. Ketahanan bangunan (*durable housing*)

Ketahanan bangunan merupakan hal yang penting untuk melihat kelayakan hunian sebuah rumah. Bila kondisi fisiknya masih baik maka penghuni rumah tersebut akan nyaman tinggal di dalam rumahnya. Kondisi fisik rumah di Provinsi Aceh memiliki keberagaman. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), terdapat 3 parameter yang menggambarkan kondisi fisik rumah, yaitu:

1. Jenis Atap Terluas

Atap berfungsi melindungi secara langsung dari cuaca yang tidak diinginkan seperti panas dan hujan. Salah satu syarat rumah layak huni adalah rumah yang menggunakan atap tidak mudah bocor.

Tabel 1.10. Persentase Rumah Tangga berdasarkan Jenis Atap Terluas

Tahun	Jenis Atap Terluas				
	Beton	Genteng	Seng	Ijuk/Rumbia	Lainnya
2022	1,65	3,52	90,98	1,52	2,33
2023	1,31	3,02	93,56	0,96	1,16
2024	2,24	2,71	92,46	0,92	1,67

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2022-2024, jenis atap seng masih menjadi pilihan utama penduduk Aceh dalam membuat atap rumah. Pada tahun 2024, lebih dari 90 persen rumah tangga menggunakan jenis atap seng. Jenis bahan bangunan atap rumah yang termasuk kategori layak adalah beton, genteng, seng, dan kayu/sirap. Asbes tidak termasuk ke dalam bangunan atap rumah yang layak disebabkan asbes tidak memenuhi syarat ketahanan bangunan karena berbahaya bagi kesehatan yang dapat menyebabkan penyakit penapasan.

2. Jenis Dinding

Selain penggunaan jenis atap, kualitas tempat tinggal juga dipengaruhi oleh penggunaan jenis dinding. Dinding memiliki fungsi utama sebagai penopang atap bangunan.

Tabel 1.11. Persentase Rumah Tangga berdasarkan Jenis Dinding

Tahun	Jenis Dinding			
	Tembok	Kayu/Papan	Anyaman Bambu	Lainnya
2022	55,72	42,59	0,42	1,27
2023	57,18	41,29	0,26	1,27
2024	59,72	38,58	0,38	1,33

Berdasarkan data BPS, penggunaan dinding tembok dan dinding kayu/papan masih menjadi pilihan utama di Provinsi Aceh pada tahun 2024, dengan persentase rumah tangga yang menggunakan dinding tembok yaitu 59,72%, dan rumah tangga yang menggunakan dinding kayu/papan yaitu 38,58%.

3. Jenis dan Luas Lantai

Indikator lain yang dapat menggambarkan kondisi rumah layak huni adalah jenis lantai rumah. Lantai yang dilapisi dengan bahan yang baik dapat menunjang kesehatan penghuni rumah karena jenis lantai dengan bahan yang baik dapat mencegah masuknya bibit penyakit yang berasal dari dalam tanah.

Tabel 1.12. Persentase Rumah Tangga berdasarkan Jenis Lantai

Tahun	Jenis Lantai					
	Marmer/Granit	Keramik	Kayu/Papan	Semen/Bata Merah	Tanah	Lainnya
2022	2,78	25,16	8,28	59,45	2,56	1,77
2023	3,27	26,03	8,57	59,09	1,93	1,11
2024	3,02	27,14	7,05	59,92	1,50	1,36

Pada tahun 2024, sebanyak 59,92 persen rumah tangga di Aceh menggunakan semen/bata merah sebagai bahan bangunan lantai rumah terluas

berdasarkan data BPS. Jenis bahan lantai yang persentasenya tertinggi setelah semen/bata merah adalah keramik. Selain penggunaannya dianggap awet, keramik juga merupakan salah satu jenis lantai yang mudah diperoleh dan memiliki harga yang relatif terjangkau.

Selain 4 (empat) kriteria yang telah disebutkan di atas, terdapat kriteria pendukung yaitu fasilitas bangunan tempat tinggal yang meliputi sumber penerangan dan sumber energi memasak.

a. Sumber Penerangan

Listrik merupakan sarana penting untuk rumah tangga sebagai sumber penerangan dan kebutuhan lainnya. Sumber utama penerangan rumah tangga dalam Susenas dikelompokkan ke dalam tiga kelompok yaitu listrik PLN, listrik non-PLN, dan bukan listrik. Listrik PLN dikelompokkan menjadi dua yaitu listrik PLN dengan meteran dan listrik PLN tanpa meteran.

Tabel 1.13. Persentase Rumah Tangga berdasarkan Jenis Sumber Penerangan

Tahun	Jenis Sumber Penerangan	
	PLN	Non-PLN dan/atau bukan Listrik
2022	99,69	0,31
2023	99,67	0,33
2024	99,73	0,27

Tabel di atas memperlihatkan bahwa tahun 2024 persentase rumah tangga yang menggunakan listrik bersumber dari PLN sekitar 99,73 persen. Kondisi ini memberikan gambaran bahwa PLN sudah menjangkau hampir seluruh rumah tangga di Provinsi Aceh.

b. Sumber Energi Memasak

Sumber energi yang digunakan untuk memasak di rumah tangga juga dapat menggambarkan kualitas fasilitas perumahan masyarakat. Semakin bersih sumber energi untuk memasak yang digunakan oleh masyarakat menandakan bahwa kehidupan masyarakat semakin baik.

Tabel 1.14. Persentase Rumah Tangga berdasarkan Bahan Bakar/Sumber Energi untuk Memasak

Tahun	Bahan Bakar/Sumber Energi untuk Memasak						
	Listrik dan Gas Kota	Gas LPG	Minyak Tanah	Kayu Bakar	Arang	Lainnya	Tidak Memasak
2022	1,30	93,44	2,16	2,41	0,01	0,02	0,66
2023	1,92	92,99	1,89	2,65	0,00	0,00	0,55

Tahun	Bahan Bakar/Sumber Energi untuk Memasak						
	Listrik dan Gas Kota	Gas LPG	Minyak Tanah	Kayu Bakar	Arang	Lainnya	Tidak Memasak
2024	1,65	94,65	1,86	1,48	0,00	0,00	0,36

Berdasarkan data BPS, tahun 2024, 94 hingga 95 dari 100 rumah tangga di Aceh menggunakan gas sebagai bahan bakar utama yang digunakan untuk memasak.

1.1.2. Capaian Pembangunan Periode Sebelumnya

Pada periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024, urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman masih dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui beberapa unit organisasi:

- Direktorat Jenderal Perumahan, yang bertanggung jawab terhadap pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan pelaksanaan Program Sejuta Rumah (PSR);
- Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur, khususnya Direktorat Pembiayaan Perumahan, yang mengelola dukungan pembiayaan serta skema fasilitasi bagi penyediaan rumah rakyat; dan
- Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman pada Direktorat Jenderal Cipta Karya, yang melaksanakan pengembangan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman, termasuk penanganan kawasan kumuh dan penyediaan PSU (prasarana, sarana, dan utilitas umum).

Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera I merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah Direktorat Jenderal Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Capaian pembangunan perumahan yang dilaksanakan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera I dari Tahun 2021 sampai dengan 2024 berdasarkan laporan kinerja adalah sebagai berikut:

- Total Pembangunan Rumah Susun dari tahun 2021 sampai tahun 2024 dengan jumlah sebanyak 503 unit.
- Total Pemeliharaan / Opor Rumah Susun dari tahun 2021 sampai tahun 2024 dengan jumlah sebanyak 6 Tower.
- Total Pembangunan Rumah Khusus dari tahun 2021 sampai tahun 2024 dengan jumlah sebanyak 20 unit.

- d. Total Pemeliharaan / Opor Rumah Khusus dari tahun 2021 sampai tahun 2024 dengan jumlah sebanyak 10 unit.
- e. Total Peningkatan kualitas Rumah Swadaya dari tahun 2021 sampai tahun 2024 dengan jumlah sebanyak 52.997 unit.
- f. Total Bantuan PSU dari tahun 2021 sampai tahun 2024 dengan jumlah sebanyak 884 unit.

Berikut merupakan tabel realisasi capaian kinerja dan penyerapan anggaran tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 dalam penyajian antara pagu anggaran, realisasi akhir tahun dan capaian progres keuangan dalam bentuk persentase.

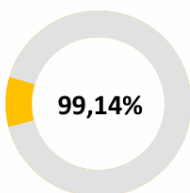
Tabel 1.15. Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2020 - 2024

Indikator Program / Kegiatan		Tahun														
		2020			2021			2022			2023			2024		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Jumlah Rumah Susun yang dibangun	21 Unit	21 Unit	100 %	86 Unit	86 Unit	100 %	183 Unit	142 Unit	77 %	93 Unit	101 Unit	108,6 %	174 Unit	174 Unit	100 %
	Jumlah Rumah Susun yang dipelihara / Opor	7 Tower	7 Tower	100 %	-	-	-	1 Tower	1 Tower	100 %	4 Tower	4 Tower	100 %	1 Tower	1 Tower	100 %
2	Jumlah Rumah Khusus yang dibangun	-	-	-	20 Unit	20 Unit	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah Rumah Khusus yang dipelihara / Opor	50 Unit	50 Unit	100 %	-	-	-	-	-	-	10 Unit	10 Unit	100 %	-	-	-
3	Jumlah Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	3000 Unit	3000 Unit	100 %	11.426 Unit	9.880 Unit	86,47 %	17.150 Unit	17.150 Unit	100 %	12.443 Unit	12.421 Unit	99,82 %	13.563 Unit	13.501 Unit	99,54 %
4	Jumlah Rumah MBR yang mendapat fasilitas layanan bantuan PSU	-	-	-	427 Unit	427 Unit	100 %	100 Unit	100 Unit	100 %	200 Unit	292 Unit	146 %	65 Unit	65 Unit	100 %

Tabel 1.16. Persentase Capaian Periode Sebelumnya

Tahun Anggaran	Pagu (Rp. Ribu)	Realisasi	Persentase Capaian
2021	4.503.153	4.464.255	99,14%
2022	5.154.443	5.093.109	98,81%
2023	5.865.820	5.661.807	96,52%
2024	5.051.374	5.026.024	99,50%

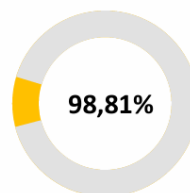
Capaian Progres
Keuangan Tahun 2021



Capaian Progres
Fisik Tahun 2021



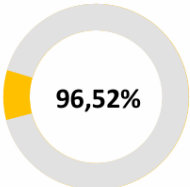
Capaian Progres
Keuangan Tahun 2022



Capaian Progres
Fisik Tahun 2022



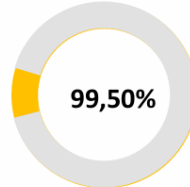
Capaian Progres
Keuangan Tahun 2023



Capaian Progres
Fisik Tahun 2023



Capaian Progres
Keuangan Tahun 2024

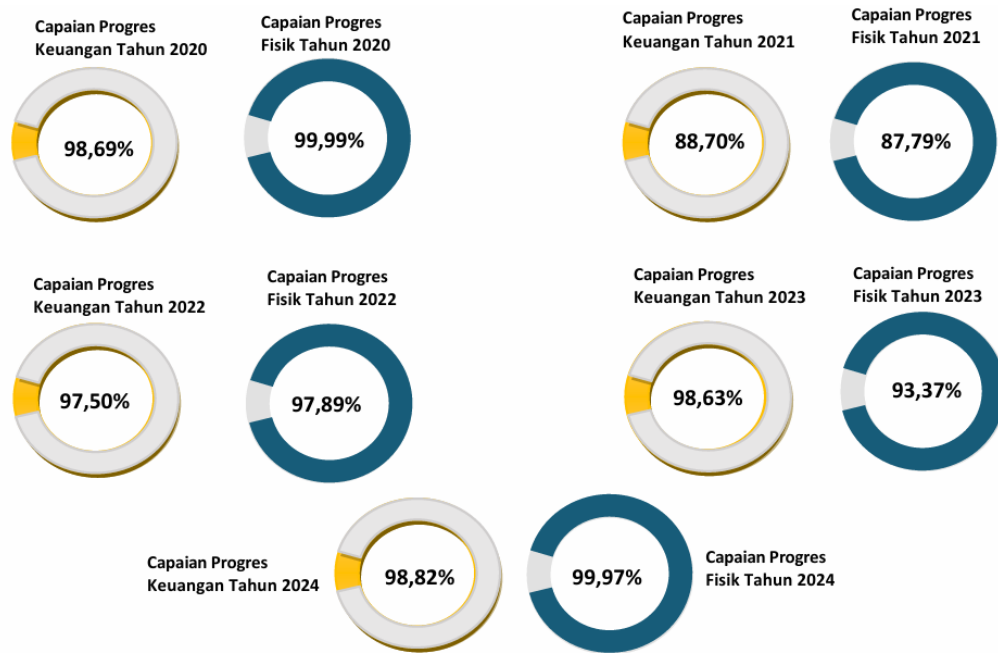


Capaian Progres
Fisik Tahun 2024



SUMBER E- MONITORING BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN SUMATERA I

Gambar 1.3. Capaian Kinerja BP2P Sumatera I dalam Persentase



SUMBER E-MONITORING SATUAN KERJA PENYEDIAAN PERUMAHAN PROVINSI ACEH

Gambar 1.4. Capaian Kinerja Satker Penyediaan Perumahan Prov. Aceh dalam Persentase

1.2. Potensi dan Permasalahan

Penyelenggaraan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman (PKP) di Indonesia dihadapkan pada berbagai tantangan yang kompleks dan multidimensional. Permasalahan yang muncul tidak hanya berkaitan dengan keterbatasan fisik seperti lahan, pendanaan, dan infrastruktur dasar, tetapi juga mencakup aspek kelembagaan, tata kelola, serta koordinasi lintas sektor yang belum optimal.

Namun, di balik beragam tantangan tersebut, terdapat pula peluang besar untuk memperkuat peran sektor PKP sebagai penggerak pembangunan wilayah dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Melalui inovasi kebijakan, integrasi data, kemitraan publik-swasta, serta pendekatan berkelanjutan yang adaptif terhadap perubahan iklim, sektor ini dapat menjadi katalis dalam mewujudkan lingkungan hunian yang layak, aman, dan berkeadilan.

1.2.1. Potensi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

a. Potensi Percepatan Penanganan *Backlog*

Provinsi Aceh memiliki kebutuhan hunian yang signifikan, baik dalam bentuk backlog kepemilikan rumah maupun rumah tidak layak huni (RTLH). Kondisi ini menunjukkan peluang besar bagi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera I untuk memperkuat peran fasilitasi teknis,

supervisi, dan pendampingan program peningkatan kualitas hunian berbasis masyarakat, sekaligus menjadi potensi strategis dalam mendukung pelaksanaan Program 3 Juta Rumah.

b. Peningkatan Pertumbuhan Penduduk

Provinsi Aceh memiliki potensi besar dalam pengembangan perumahan dan kawasan permukiman melalui pertumbuhan penduduk yang mencapai sekitar 5,62 juta jiwa dengan laju pertumbuhan 1,37% per tahun menunjukkan adanya kebutuhan hunian baru yang terus meningkat.

c. Pengalaman Rekonstruksi Pasca Bencana

Provinsi Aceh memiliki pengalaman panjang dalam rekonstruksi pasca-tsunami 2004 yang melibatkan berbagai pihak internasional dan nasional. Modal sosial, teknis, serta kelembagaan yang terbentuk dari proses tersebut menjadi kekuatan besar dalam membangun perumahan dan kawasan permukiman yang lebih tangguh dan berkelanjutan

d. Ketersediaan Lahan

Banyak wilayah perdesaan di Aceh masih memiliki lahan yang relatif luas dan belum terbangun. Hal ini membuka peluang untuk pengembangan perumahan rakyat, terutama program rumah swadaya dan rumah subsidi, yang dapat menjangkau masyarakat berpenghasilan rendah.

e. Pertumbuhan Kota dan Urbanisasi

Kota-kota seperti Banda Aceh, Lhokseumawe, dan Langsa mengalami pertumbuhan pesat. Urbanisasi ini menciptakan kebutuhan baru akan kawasan permukiman terintegrasi dengan infrastruktur perkotaan, sekaligus membuka peluang investasi sektor perumahan.

1.2.2. Permasalahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Penyelenggaraan bidang perumahan dan kawasan permukiman di Indonesia masih menghadapi tantangan struktural yang kompleks, baik dari sisi tata kelola, pembiayaan, maupun kualitas dan keberlanjutan kawasan. Permasalahan ini tidak hanya terkait keterbatasan sumber daya, tetapi juga lemahnya integrasi kebijakan antar sektor dan belum optimalnya peran pemerintah daerah serta masyarakat. Dalam konteks kelembagaan baru Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, berbagai isu lama kini perlu ditangani secara lebih terarah dan sistematis agar pembangunan perumahan dapat benar-benar berfungsi sebagai instrumen kesejahteraan publik dan pemerataan pembangunan wilayah.

Secara umum, permasalahan penyelenggaraan perumahan adalah keterjangkauan masyarakat terhadap hunian yang layak huni, baik dalam hal pembelian rumah baru yang layak huni, maupun pembangunan rumah secara swadaya, serta masih banyaknya masyarakat yang menempati rumah tidak layak huni. Permasalahan keterjangkauan disebabkan oleh adanya ketimpangan antara pasokan (*supply*) dan kebutuhan (*demand*). Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam penyediaan rumah yang layak huni, terjangkau, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat.

a. Tingginya Backlog Kepemilikan dan RTLH

Berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), *backlog* kepemilikan rumah dan *backlog* RTLH tercatat sebesar 266.703 unit dan 308.535 unit. Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan perumahan di Provinsi Aceh bukan hanya terkait dengan kuantitas pasokan rumah, tetapi juga kualitas hunian yang tersedia.

b. Kerentanan Terhadap Bencana

Provinsi Aceh merupakan daerah rawan gempa dan tsunami. Dalam menghadapi cuaca ekstrem, beberapa wilayah di Provinsi Aceh rentan terkena bencana banjir bandang. Namun, masih banyak rumah dibangun tanpa memperhatikan standar ketahanan bencana. Permukiman di pesisir dan daerah rawan gempa seringkali tidak memiliki jalur evakuasi atau desain rumah tahan gempa. Hal ini meningkatkan risiko kerugian besar bila terjadi bencana.

c. Urbanisasi Tidak Terkendali

Pertumbuhan kota di Aceh seringkali tidak sejalan dengan tata ruang. Urbanisasi sporadis menyebabkan munculnya permukiman tidak teratur di pinggiran kota, rawan banjir, dan tidak memiliki akses infrastruktur memadai. Kawasan kumuh baru pun bermunculan, menambah beban pemerintah dalam penataan kota.

d. Permasalahan Legalitas dan Sengketa Tanah

Banyak masyarakat tinggal di tanah tanpa sertifikat atau status hukum yang jelas. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024, persentase rumah tangga yang menempati rumah milik sendiri di Provinsi Aceh sebesar 85,14 persen. Dari total tersebut, hanya 64,38 persen rumah tangga yang memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama anggota rumah tangga (ART). Kondisi ini menghambat pembangunan perumahan formal karena masyarakat tidak bisa

mengakses program pemerintah maupun pembiayaan bank tanpa legalitas tanah yang sah.

1.2.3. Analisis Berdasarkan Potensi dan Permasalahan

Berdasarkan potensi dan permasalahan yang ada, maka dilakukan analisis dengan metode SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*) untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, serta peluang dan ancaman eksternal yang memengaruhi sektor perumahan di Provinsi Aceh. Analisis SWOT dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.17. Analisis SWOT

Strengths	Weaknesses
1. Potensi percepatan penanganan backlog melalui Program 3 Juta Rumah 2. Pertumbuhan penduduk 5,62 juta jiwa dengan laju 1,37% per tahun 3. Pengalaman rekonstruksi pasca tsunami 2004 sebagai modal sosial dan teknis 4. Ketersediaan lahan yang luas 5. Pertumbuhan kota dan urbanisasi membuka peluang investasi	1. Backlog kepemilikan rumah 266.703 unit dan RTLH 308.535 unit masih tinggi 2. Keterjangkauan hunian masih rendah bagi masyarakat berpenghasilan rendah 3. Urbanisasi tidak terkendali, memunculkan permukiman kumuh baru 4. Permasalahan legalitas tanah dan sengketa lahan 5. Kualitas bangunan belum seragam, banyak rumah tidak layak huni
Opportunities	Threats
1. Dukungan program nasional seperti FLPP, BPS dan lain-lain 2. Potensi investasi swasta di sektor perumahan 3. Digitalisasi tata kelola dan pengendalian risiko perumahan dan kawasan permukiman 4. Kesadaran masyarakat terhadap hunian layak semakin meningkat	1. Kerentanan terhadap bencana: gempa, tsunami, banjir bandang 2. Ketimpangan pembangunan kota–desa 3. Sengketa tanah berkelanjutan menghambat akses program 4. Perubahan tata ruang tidak sesuai rencana, menambah kawasan kumuh

The background of the entire page is a light blue map pattern with various street layouts and building footprints. A white rectangular box is positioned in the upper left quadrant, containing the chapter title.

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

2.1. Tujuan Balai

Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera I memiliki tujuan:

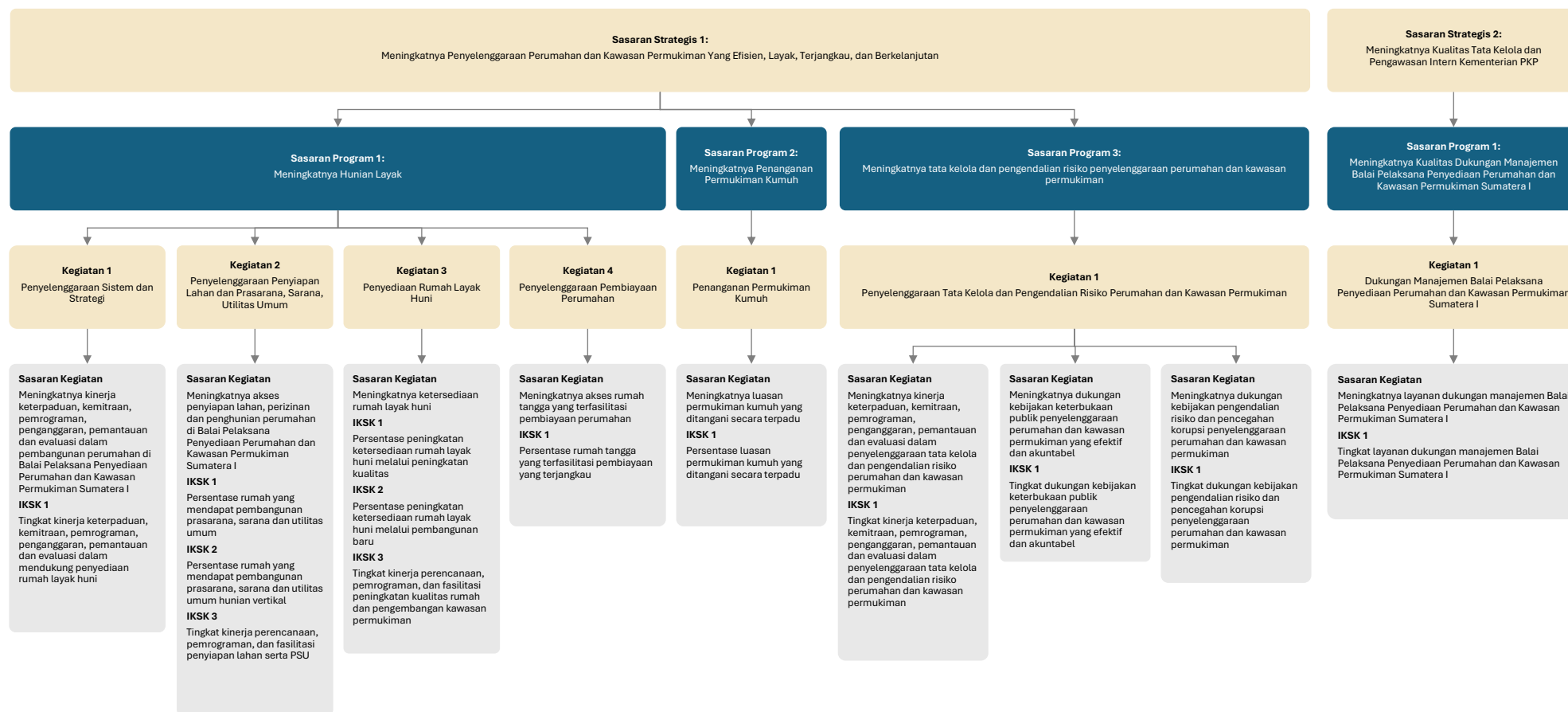
- a. Meningkatkan akses masyarakat terhadap hunian layak, terjangkau, berkualitas, berkeadilan, dan berkelanjutan;
- b. Melaksanakan penanganan permukiman kumuh secara terpadu dan berkelanjutan;
- c. Mewujudkan tata kelola dan pengendalian risiko penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang transparan, akuntabel, berintegritas, serta berbasis kolaborasi lintas sektor;
- d. Meningkatkan kualitas tata kelola internal dan pengawasan program, sebagai bagian dari kontribusi terhadap peningkatan kualitas tata kelola dan pengawasan intern Kementerian;

2.2. Sasaran Program Balai

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman menetapkan 2 (dua) Sasaran Strategis dalam pelaksanaan Program Perumahan dan Kawasan Permukiman. Untuk mendukung tercapainya sasaran strategis tersebut, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera I menetapkan Sasaran Program yang terdiri dari beberapa Sasaran Kegiatan, yaitu:

- a. Meningkatnya hunian layak, dengan sasaran kegiatan:
 1. Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam pembangunan perumahan di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera I;
 2. Meningkatnya akses penyiapan lahan, perizinan dan penghunian perumahan di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera I;
 3. Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni;
 4. Meningkatnya akses rumah tangga yang terfasilitasi pembiayaan perumahan
- b. Meningkatnya penanganan kumuh, dengan sasaran kegiatan:
 1. Meningkatnya luasan permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu

- c. Meningkatnya tata kelola dan pengendalian risiko penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, dengan sasaran kegiatan:
 - 1. Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan tata kelola dan pengendalian risiko perumahan dan kawasan permukiman;
 - 2. Meningkatnya dukungan kebijakan keterbukaan publik penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang efektif dan akuntabel
 - 3. Meningkatnya dukungan kebijakan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.
- d. Meningkatnya kualitas dukungan manajemen, dengan sasaran kegiatan:
 - 1. Meningkatnya layanan dukungan manajemen Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera I



Gambar 2.1. Pohon Kinerja BP3KP Sumatera I

The background of the entire page is a light blue map pattern with various street layouts and building footprints. A white rectangular box is positioned in the upper left quadrant, containing the chapter title and subtitle. A vertical dashed line is located to the left of the chapter title.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Unit Organisasi

Arah kebijakan dan strategi unit organisasi dirumuskan dengan fokus penguatan yang perlu dilakukan oleh setiap unit untuk mendukung pencapaian tujuan Kementerian. Penjabaran ini menekankan arah kebijakan prioritas dan strategi untuk pendekatannya dalam rangka penguatan kinerja yang memastikan tata kelola serta pelayanan publik berjalan lebih efektif, adaptif, dan selaras dengan agenda pembangunan nasional.

3.1.1. Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman

- a. Meningkatkan akses masyarakat terhadap hunian layak dan terjangkau melalui penyediaan serta peningkatan kualitas perumahan, dilakukan dengan menerapkan strategi:
 1. Percepatan pembangunan baru rumah susun, rumah khusus, dan rumah swadaya;
 2. Percepatan peningkatan kualitas rumah swadaya dan penyediaan sanitasi;
 3. Fasilitasi penyediaan lahan untuk perumahan yang aman dan terjangkau; dan
 4. Penyediaan PSU pada hunian tapak dan vertikal.
- b. Mempercepat penyediaan rumah layak huni melalui implementasi skema penyediaan perumahan yang inovatif, dilakukan dengan menerapkan strategi:
 1. Dukungan optimalisasi pemanfaatan skema pembiayaan alternatif seperti kredit mikro perumahan dan skema lainnya;
 2. Pengembangan klinik perumahan untuk mendukung peningkatan kapasitas stakeholder perumahan dan masyarakat; dan
 3. Dukungan pengembangan perumahan melalui pendekatan hunian berimbang.
- c. Meningkatkan kualitas permukiman secara terpadu, dilakukan dengan menerapkan strategi pendampingan dan penguatan Pemerintah Daerah dalam menyusun kelengkapan instrumen perencanaan penyelenggaraan kawasan permukiman terpadu serta penataan kawasan kumuh melalui

pembangunan infrastruktur kawasan permukiman, yang meliputi rumah, jalan, drainase, air minum, sanitasi, persampahan, dan proteksi kebakaran.

d. Memperkuat ekosistem perumahan dan kawasan permukiman dalam mendukung hunian layak, dilakukan dengan menerapkan strategi:

1. Penyusunan dan harmonisasi regulasi bidang perumahan dan kawasan permukiman;
2. Peningkatan kolaborasi antarpemangku kepentingan dan penguatan kelembagaan dalam penyelenggaraan perumahan;
3. Peningkatan pendataan dan monitoring evaluasi bidang perumahan dan kawasan permukiman;
4. Memberikan pembinaan kepada pelaku usaha perumahan dan fasilitasi perlindungan konsumen perumahan;
5. Pembinaan teknis bidang perumahan dan kawasan permukiman kepada pemangku kepentingan; dan
6. Pemanfaatan inovasi teknologi konstruksi dan material untuk
7. mendukung percepatan penyediaan perumahan bagi MBR.

3.1.2. Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan

a. Mempercepat penyediaan rumah layak huni di wilayah perdesaan, dengan strategi:

1. Percepatan pembangunan rumah baru di wilayah perdesaan;
2. Perluasan cakupan peningkatan kualitas rumah di wilayah perdesaan;
3. Penyediaan PSU perumahan di wilayah perdesaan;
4. Pengembangan model perumahan perdesaan yang terintegrasi dengan fasilitas sosial dan fasilitas umum; dan
5. Fasilitasi penyediaan lahan untuk perumahan yang layak dan terjangkau tanpa mengurangi lahan produktif di wilayah perdesaan atau menimbulkan konflik agraria.

b. Mendorong penyediaan rumah layak melalui skema pembiayaan perumahan inovatif, dengan strategi:

1. Pengembangan kerja sama dengan lembaga keuangan mikro di wilayah perdesaan;
2. Pengembangan skema tabungan berencana;
3. Pengembangan bantuan tunai/in-kind yang terintegrasi dengan program pembangunan desa;

4. Pengembangan skema kredit renovasi rumah (KRR) dan Kredit bangun rumah (KBR);
 5. Pengembangan kerja sama dengan koperasi sebagai wadah untuk masyarakat perdesaan dalam mengakses pembiayaan perumahan; dan
 6. Peningkatan subsidi pembiayaan perumahan melalui KPR FLPP, SSB, dan SBUM untuk MBR di wilayah perdesaan.
- c. Menyediakan sistem regulasi, pemanfaatan teknologi serta mengembangkan pola koordinasi, dengan strategi:
1. Penyusunan dan harmonisasi regulasi bidang perumahan dan kawasan permukiman perdesaan serta perumusan kebijakan dan strategi jangka panjang perumahan di wilayah perdesaan;
 2. Penyusunan NSPK di bidang penyiapan lahan, koordinasi perizinan, penyiapan penghunian perumahan perdesaan;
 3. Penyusunan NSPK di bidang penyusunan skema pembiayaan perumahan perdesaan;
 4. Penyusunan NSPK di bidang pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan perdesaan;
 5. Penyusunan panduan pembinaan teknis dan supervise penyelenggaraan perumahan perdesaan;
 6. Penyusunan panduan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan perumahan perdesaan; dan
 7. Pengembangan diversifikasi model perumahan perdesaan yang sesuai dengan konteks lokal.
- d. Meningkatkan kolaborasi antarpemangku dalam rangka mengembangkan perumahan dan kawasan permukiman di wilayah perdesaan, dengan strategi:
1. Peningkatan kolaborasi pemerintah pusat melalui kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat serta pemangku kepentingan lainnya dalam penyelenggaraan perumahan perdesaan;
 2. Peningkatan kapasitas pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman perdesaan di bidang penyiapan lahan, koordinasi perizinan, penyiapan penghunian dan penyusunan skema pembiayaan, Pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan perdesaan;

3. Pelaksanaan harmonisasi perencanaan kawasan perdesaan antara pemerintah pusat dan daerah;
4. Pelaksanaan koordinasi antarpemangku kepentingan terkait penyelenggaraan perumahan perdesaan; dan
5. Penguatan kelembagaan.

3.1.3. Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan

- a. Mempercepat penyediaan rumah layak huni di wilayah perkotaan, dengan strategi:
 1. Percepatan pembangunan rumah baru di wilayah perkotaan;
 2. Perluasan cakupan peningkatan kualitas rumah di wilayah perkotaan;
 3. Penyediaan PSU perumahan di wilayah perkotaan; dan
 4. Pengembangan model perumahan perkotaan yang terintegrasi dengan fasilitas sosial dan fasilitas umum.
- b. Optimalisasi pemanfaatan lahan milik negara/daerah/BUMN serta mendorong pengembangan perumahan vertikal, dengan strategi mendorong intensifikasi pemanfaatan lahan melalui skema KPBU dan pendekatan kawasan terpadu, seperti kawasan campuran dan kawasan TOD.
- c. Mendorong pembangunan perumahan terintegrasi dengan Kawasan strategis dan transportasi publik (TOD), dengan strategi mengembangkan kawasan perumahan berbasis transit (TOD) dan kawasan perkotaan baru.
- d. Meningkatkan kolaborasi antarpemangku kepentingan dalam rangka mengembangkan perumahan dan kawasan permukiman di wilayah perkotaan, dengan strategi:
 1. Peningkatan kolaborasi pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat serta pemangku kepentingan lainnya dalam penyelenggaraan perumahan perkotaan;
 2. Peningkatan kapasitas pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman perkotaan di bidang penyiapan lahan, koordinasi perizinan, penyiapan penghunian dan penyusunan skema pembiayaan, pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan perkotaan;
 3. Pelaksanaan harmonisasi perencanaan kawasan perkotaan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 4. Pelaksanaan koordinasi antarpemangku kepentingan terkait penyelenggaraan perumahan perkotaan; dan

5. Penguatan kelembagaan.

- e. Penguatan perencanaan, koordinasi, dan integrasi program antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, dengan strategi pengembangan sistem informasi perumahan terintegrasi dan penyelarasan program perumahan antarlevel pemerintahan.
- f. Pengembangan skema pembiayaan perumahan berbasis kebutuhan MBR, dengan strategi inovasi pembiayaan mikro perumahan, kredit konstruksi swadaya, dan kolaborasi dengan lembaga keuangan nonbank.
- g. Penerapan teknologi konstruksi murah dan cepat serta penguatan sistem informasi perumahan dan permukiman berbasis digital, dengan strategi penggunaan teknologi rancang bangun rumah terkini, digitalisasi sistem monitoring, dan pemutakhiran basis data rumah.
- h. Percepatan penghunian, dengan strategi revitalisasi rusun, pelatihan pengelolaan rusun oleh penghuni, serta integrasi rusun dengan fasilitas sosial dan ekonomi.

3.1.4. Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko (TKPR)

- a. Menjamin penanganan dan pengawasan atas pelaksanaan bantuan perumahan bagi MBR serta menjamin ketepatan sasaran penerima manfaat, dengan strategi penguatan tata kelola dan regulasi atas pelaksanaan bantuan pembangunan maupun peningkatan kualitas rumah baik dalam bentuk intervensi langsung maupun dalam bentuk subsidi serta menjamin ketepatan sasaran penerima manfaat bantuan perumahan melalui pemanfaatan data yang terintegrasi secara nasional.
- b. Peningkatan kualitas tata kelola hunian publik dan hunian privat vertikal melalui penyusunan NSPK yang digunakan untuk mengelola dan mengawasi penyediaan serta pengelolaan perumahan publik, dengan strategi penguatan tata kelola yang berorientasi pada ketersediaan hunian yang terjangkau, layak huni, dan berkelanjutan bagi masyarakat, dengan penekanan pada transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi.
- c. Mendorong diversifikasi sumber pembiayaan perumahan, mengembangkan dan memperluas skema pembiayaan diluar FLPP 100% KPR, meningkatkan akurasi ketepatan sasaran melalui integrasi data nasional, dan penguatan regulasi dan tata kelola pembiayaan perumahan, dengan strategi sebagai berikut:

1. Diversifikasi pendanaan melalui implementasi skema Tapera sebagai tambahan pembiayaan, penggunaan skema pinjaman/hibah multilateral, dan program perumahan hijau dan terjangkau di Indonesia (*Indonesia Green Affordable Housing Program* atau IGAHP).
2. Melakukan koordinasi secara intensi dengan Bank Indonesia dan pemangku kepentingan lain.
3. Optimalisasi pemanfaatan DTSEN dan sistem antrean perumahan.
4. Regulasi dan tata kelola penyusunan petunjuk teknis, peraturan menteri, dan keputusan menteri untuk mendukung efektivitas kebijakan
- d. Penguatan regulasi mekanisme kemitraan dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, dengan strategi penyusunan Surat Edaran Menteri tentang Mekanisme Kemitraan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- e. Meningkatkan kemitraan dengan pemangku kepentingan lain dengan penguatan regulasi mekanisme kemitraan dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, dengan strategi memperluas kemitraan dengan pemangku kepentingan lain dan pengaturan mekanisme kemitraan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.
- f. Menciptakan sektor perumahan yang inklusif dan berkelanjutan diperlukan penguatan terhadap seluruh ekosistem perumahan serta perbaikan tata kelolanya, dengan strategi sebagai berikut:
 1. Governance, penyusunan NSPK dan bimbingan teknis tata Kelola dan pengendalian risiko;
 2. Risk, penguatan SPIP dan e-Manajemen Risiko;
 3. Compliance, penancangan dan pembangunan zona integritas, sistem informasi pemantauan TKPR (e-Pantau), sistem manajemen anti penyuapan (SMAP), dan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
 4. Financing, kerjasama investasi asing, antrean perumahan, FLPP, IGAHP, skema jaminan penyerapan (off-take guarantee); dan
 5. Pembangunan baru atau renovasi melalui CSR dan penyiapan lahan.

3.1.5. Arah Kebijakan dan Strategi Sekretariat Jenderal

Sekretariat Jenderal berperan sentral dalam mendukung keberhasilan program dan kebijakan Kementerian melalui penguatan kelembagaan, pengelolaan sumber daya, dan tata kelola internal. Arah kebijakan ke depan difokuskan pada:

- a. Penguatan Perencanaan dan Penganggaran, melalui strategi:
 - 1. Penyusunan kebutuhan anggaran tahunan yang lebih rinci, berbasis data, dan mempertimbangkan pelaksanaan anggaran sebelumnya; dan
 - 2. Integrasi antara perencanaan dan penganggaran serta peningkatan kualitas pemantauan dan evaluasi kegiatan.
- b. Transformasi Digital dan Tata Kelola, melalui strategi:
 - 1. Transformasi digital dalam layanan administrasi, kepegawaian, pelayanan publik, pengelolaan data dan informasi, serta sistem pengadaan barang dan jasa; dan
 - 2. Penyederhanaan proses birokrasi dan peningkatan efisiensi melalui sistem informasi terintegrasi.
- c. Penguatan Sumber Daya Manusia, melalui strategi:
 - 1. Pemetaan dan pemenuhan kebutuhan SDM berbasis analisis beban kerja (ABK) dan kompetensi;
 - 2. Pengembangan manajemen talenta ASN melalui pelatihan, promosi berbasis merit, pemetaan karier, serta pembentukan balai kompetensi; dan
 - 3. Peningkatan kapasitas SDM di seluruh bidang fungsional, termasuk keuangan, pengadaan, hukum, komunikasi, dan data.
- d. Penguatan Sistem Informasi dan Data, melalui strategi:
 - 1. Pengembangan sistem informasi sektoral terintegrasi berbasis satu data Indonesia; dan
 - 2. Optimalisasi pemanfaatan data sebagai dasar kebijakan, perencanaan, dan evaluasi program secara berbasis bukti (evidence-based policy).
- e. Peningkatan Layanan Dukungan Manajemen, melalui strategi:
 - 1. Perbaikan kualitas layanan tata usaha pimpinan, pengelolaan kearsipan, protokoler, serta penyediaan sarana dan prasarana kantor; dan
 - 2. Penguatan layanan keamanan, ketertiban, dan kehumasan secara profesional dan responsif.
- f. Percepatan Regulasi dan Advokasi Hukum, melalui strategi:
 - 1. Peningkatan kualitas pembentukan produk hukum, pembinaan SDM hukum, dan advokasi hukum yang responsif dan solutif; dan
 - 2. Digitalisasi dan penguatan jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH).

- g. Modernisasi dan Optimalisasi Pengelolaan Keuangan dan BMN, melalui strategi:
 - 1. Pembinaan dan pendampingan intensif terhadap pengelolaan keuangan dan BMN; dan
 - 2. Peningkatan akuntabilitas, pengamanan, dan optimalisasi pemanfaatan aset negara.
- h. Penguatan Sistem dan Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa, melalui strategi:
 - 1. Penguatan kelembagaan UKPBJ dan SDM pengadaan; dan
 - 2. Integrasi perencanaan pengadaan dengan penganggaran serta pemanfaatan sistem e-Procurement untuk efisiensi dan transparansi.
- i. Penguatan Komunikasi Publik dan Pelayanan Publik, melalui strategi:
 - 1. Penyusunan NSPK komunikasi publik, penguatan pelayanan berbasis teknologi dan informasi, dan pengelolaan media digital secara terintegrasi; dan
 - 2. Kolaborasi lintas kementerian/lembaga dan media untuk memperluas jangkauan informasi dan mitigasi disinformasi.
- j. Kolaborasi dan Pendanaan Alternatif, melalui strategi:
 - 1. Peningkatan sinergi dengan mitra dan pemangku kepentingan termasuk CSR dan sumber pendanaan Non-APBN; dan
 - 2. Perencanaan dan pengelolaan dana pinjaman serta program pembiayaan seperti KUR secara terarah dan akuntabel.

3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera I

Dalam mendukung pencapaian Unit Organisasi dalam melaksanakan Rencana Strategis Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025 - 2029, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera I merumuskan arah kebijakan yaitu meningkatkan akses masyarakat terhadap hunian layak; mempercepat penyediaan rumah layak huni; meningkatkan kualitas perumahan secara terpadu; serta menguatkan ekosistem perumahan dan kawasan permukiman melalui peningkatan dukungan manajemen dalam mendukung hunian layak.

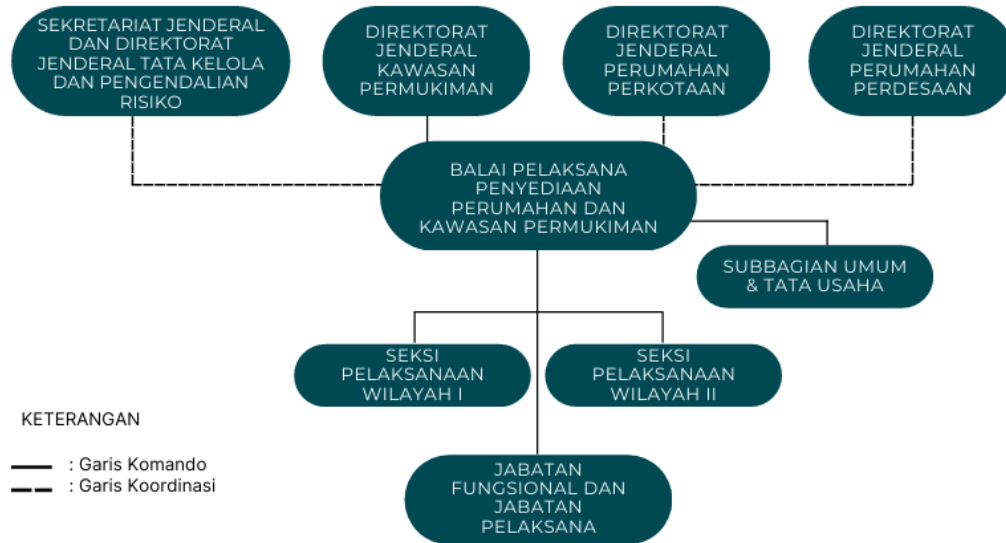
Strategi yang mendukung arah kebijakan tersebut yaitu:

- a. Meningkatkan sosialisasi dan koordinasi pelaksanaan regulasi dan kebijakan pembangunan perumahan yang implementatif dan berpihak kepada seluruh kelompok masyarakat secara proporsional dan berimbang, sehingga tercipta iklim yang kondusif untuk mempercepat penyediaan perumahan yang layak huni.
- b. Memberdayakan seluruh pemangku kepentingan dalam rangka mewujudkan pembangunan perumahan yang sinergis, efektif dan efisien, yaitu pemerintah sebagai *regulator* dan *enabler*, sedangkan masyarakat dan dunia usaha sebagai *provider* melalui:
 1. Membenahi tata laksana dan penguatan dukungan kelembagaan pembangunan perumahan, baik di pusat maupun daerah;
 2. Melaksanakan program-program strategis nasional dan percontohan untuk penyediaan tempat tinggal yang layak terutama untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR);
 3. Meningkatkan kualitas dan kapasitas pelaku pembangunan perumahan dengan pembinaan dalam rangka menjamin kualitas dari pembangunan rumah yang layak huni;
 4. Mendorong pemerintah daerah agar berperan sesuai kewenangannya dalam pembangunan perumahan, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota didukung dengan mekanisme pendanaan yang tepat baik melalui dana dekonsentrasi, tugas pembantuan, hibah maupun Dana Alokasi Khusus (DAK).
- c. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan perumahan di daerah melalui:
 1. Mendukung dan melakukan fasilitasi dalam penyusunan rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman (RP3KP) di daerah dalam rangka perencanaan pembangunan perumahan perumahan dan kawasan permukiman yang terpadu, baik secara lintas sektor maupun wilayah;
 2. Mensinergikan perencanaan pembangunan perumahan dengan rencana pembangunan nasional daerah;
 3. Meningkatkan kualitas perencanaan yang terpadu melalui penyediaan data yang akurat dan termutakhir;

4. Mengoptimalkan pengawasan dan pengendalian dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pembangunan perumahan yang akuntabel.
- d. Mengembangkan penyediaan perumahan yang berkeadilan melalui:
 1. Penguatan perumahan umum melalui fasilitasi penyediaan rumah umum tapak yang dilaksanakan oleh swasta, serta pembangunan rumah susun, baik sewa maupun milik dengan memanfaatkan tanah negara dan terlantar;
 2. Pemberdayaan perumahan swadaya melalui peningkatan keswadayaan masyarakat dalam pembangunan, pemeliharaan dan pencegahan rumah tidak layak huni, serta peningkatan kualitas rumah tidak layak huni;
 3. Fasilitasi perumahan khusus melalui pembangunan rumah khusus di daerah pasca bencana/konflik, kawasan tertinggal, maritim/nelayan.
- e. Meningkatkan efisien dalam pembangunan perumahan yang berkelanjutan melalui pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan.
- f. Meningkatkan kualitas layanan dukungan manajemen melalui:
 1. Penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja
 2. Digitalisasi dan transformasi layanan internal
 3. Pengembangan kapasitas sumber daya manusia
 4. Memperkuat pengawasan internal melalui pembangunan zona integritas dan penerapan manajemen risiko

3.3. Kerangka Kelembagaan

Kerangka kelembagaan menjelaskan fungsi dan struktur organisasi dalam upaya mencapai sasaran strategis, tata laksana internal maupun eksternal yang diperlukan antar unit organisasi, serta pengelolaan sumber daya manusia dalam segi kualitas dan kuantitas. Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera I merupakan bagian dari kelembagaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman di bawah Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.



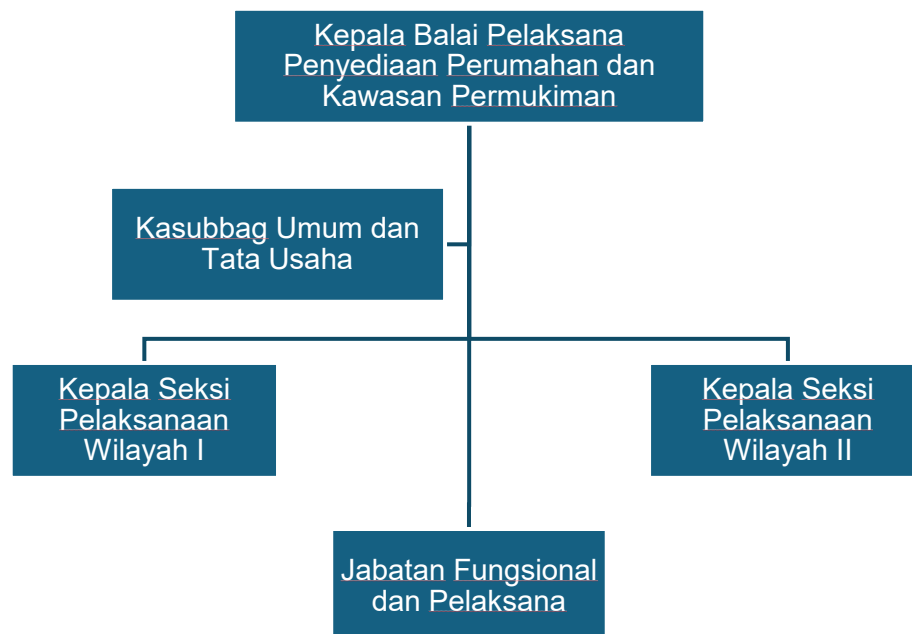
Gambar 3.1. Diagram SOTK UPT Kementerian PKP

Berdasarkan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman No. 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian PKP, BP3KP mempunyai tugas melaksanakan penyediaan perumahan, peningkatan kualitas perumahan, pengembangan kawasan permukiman, penataan kawasan permukiman pasca bencana dan kerusakan sosial, dan fasilitasi serah terima aset. Dalam melaksanakan tugas tersebut, BP3KP menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- Penyusunan program dan anggaran pelaksanaan pengembangan kawasan permukiman, pemberian bantuan prasarana, sarana, dan utilitas umum, serta pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan;
- Penyusunan rencana teknis pengembangan kawasan permukiman, pemberian bantuan prasarana, sarana, dan utilitas umum, serta pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan;
- Pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan;
- Pelaksanaan dan koordinasi pengawasan dan pengendalian teknis pengembangan kawasan permukiman, pemberian bantuan prasarana, sarana, dan utilitas umum, serta pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan;
- Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;
- Pengelolaan data dan informasi perumahan dan kawasan permukiman;
- Pelaksanaan koordinasi dan dukungan penataan kawasan permukiman pasca bencana dan kerusakan sosial;

- h. Pelaksanaan koordinasi penyediaan lahan dan pengembangan hunian;
- i. Pelaksanaan koordinasi pemanfaatan dan penghunian perumahan;
- j. Pelaksanaan fasilitasi bina usaha dan perlindungan konsumen perumahan;
- k. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi forum perumahan dan kawasan permukiman;
- l. Pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan koordinasi fasilitasi pembiayaan perumahan;
- m. Pelaksanaan fasilitasi serah terima aset;
- n. Pelaksanaan dan koordinasi reformasi birokrasi, pembangunan zona integritas, sistem pengendalian intern, sistem manajemen risiko, serta sistem pengendalian anti korupsi dan penyuapan;
- o. Pelaksanaan urusan tata usaha, umum dan rumah tangga, komunikasi publik, serta layanan hukum balai.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera I dipimpin oleh seorang Kepala Balai dan memiliki susunan organisasi sebagai berikut:



Gambar 3.2. Struktur Organisasi BP3KP Sumatera I

a. Kepala Balai

Penanggung jawab utama pelaksana seluruh tugas dan fungsi BP3KP di wilayah Sumatera I

b. Subbagian Umum dan Tata Usaha

Dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Umum dan Tata Usaha, dan mempunyai tugas melakukan penyusunan program dan anggaran, pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga, dan administrasi sumber daya manusia, pengelolaan dan pelaporan administrasi keuangan, pelaksanaan dan koordinasi reformasi birokrasi dan pembangunan zona integritas, koordinasi administrasi pelaksanaan sistem pengendalian intern dan penerapan manajemen risiko, komunikasi publik, serta layanan hukum balai.

c. Seksi Pelaksanaan Wilayah I dan Wilayah II

Dipimpin oleh masing-masing Kepala Seksi Pelaksanaan Wilayah I dan Kepala Seksi Pelaksanaan Wilayah II, serta mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan pembangunan dan koordinasi penyusunan rencana teknis perumahan, koordinasi penyediaan lahan, pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kualitas rumah dan prasarana, sarana, dan utilitas umum, fasilitasi penghunian, pengawasan dan pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, serta verifikasi data.

d. Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana

Meliputi jabatan fungsional teknis (seperti Penata Kelola Perumahan, Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman), jabatan fungsional non teknis (Arsiparis, Pengelola Keuangan APBN, Analis Sumber Daya Manusia Aparatur, dan lain-lain) dan jabatan pelaksana yang bertugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi UPT sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

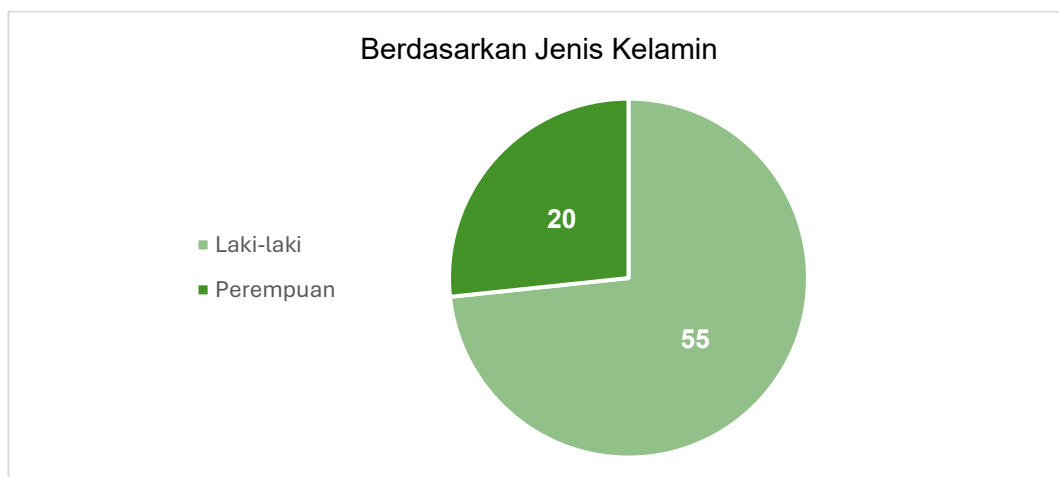
Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera I bekerja secara kolaboratif dengan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Aceh. Pemerintah provinsi berperan dalam koordinasi program lintas kabupaten/kota dan pemantauan kebijakan strategis, sedangkan pemerintah kabupaten/kota bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis pembangunan perumahan serta sarana-prasarana pendukung di wilayahnya. Kolaborasi ini memastikan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang layak, terjangkau, efisien, dan berkelanjutan.

3.4. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia pada Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera I merupakan komponen fundamental dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan. Kondisi eksisting pegawai saat ini menunjukkan komposisi yang beragam dari sisi jumlah, kualifikasi pendidikan, serta distribusi jabatan. Data pegawai yang dilampirkan memberikan gambaran nyata mengenai kapasitas organisasi dalam menjalankan program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Kondisi eksisting jumlah pegawai Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera I sebanyak 75 orang dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.1. Persebaran Pegawai BP3KP Sumatera I

Unit Kerja	Jumlah
Balai P3KP Sumatera I	43
Satuan Kerja PKP Provinsi Aceh	32
Total	75



Gambar 3.3. Diagram Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 3.2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Pendidikan Terakhir	Jurusan	Jumlah
S-2	Teknik Sipil	1
	Magister Teknik	1
	Sains	1
	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan	1
	Administrasi Publik	1
	Ilmu Hukum Bisnis	1
	Manajemen Sistem Informasi	1
Total		7

Pendidikan Terakhir	Jurusan	Jumlah
S-1	Teknik Sipil	15
	Arsitektur	12
	Ekonomi Manajemen	5
	Perencanaan Wilayah dan Kota	3
	Teknik Lingkungan	1
	Teknik Informatika	1
	Teknologi Informasi	1
	Akuntansi	1
	Ilmu Administrasi Publik	1
	Ekonomi Syariah	1
	Bahasa dan Sastra Arab	1
	Ilmu Politik	1
Total		43
D-IV	Teknik Sipil	2
Total		2
D-III	Perpajakan	4
	Akuntansi	1
	Manajemen Informatika	1
Total		6
SMA/SLTA		13
SMK/STM		4
Total		17

Tabel 3.3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat / Golongan

Status Kepegawaian	Pangkat / Golongan		Jumlah
PNS	Pembina Tingkat I	IV/b	1
	Pembina	IV/a	4
	Penata Tingkat I	III/d	5
	Penata	III/c	2
	Penata Muda Tingkat I	III/b	4
	Penata Muda	III/a	1
	Pengatur Tingkat I	II/d	2
CPNS	Penata Muda	III/a	21
PPPK	Ahli Pertama	IX	14
	Terampil	VII	5
	Pemula	V	8

Tabel 3.4. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan

Jenis Jabatan	Jabatan	Jenjang	Jumlah
Struktural	Kepala Balai	Eselon III.b	1
	Kasubbag Umum dan Tata Usaha	Eselon IV.a	1
	Kepala Seksi Wilayah I	Eselon IV.a	1
	Kepala Seksi Wilayah II	Eselon IV.a	1

Jenis Jabatan	Jabatan	Jenjang	Jumlah
Fungsional	Penata Kelola Perumahan	Ahli Madya	2
		Ahli Muda	2
		Ahli Pertama	14
	Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman	Ahli Pertama	16
	Arsiparis	Ahli Pertama	5
	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN	Ahli Pertama	2
	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur	Ahli Pertama	1
	Pranata Komputer	Terampil	2
Pelaksana	Analisis Perumahan	-	1
	Pelaksana Teknis	-	1
	Pelaksana Umum	-	1
	Analisis Keuangan	-	1
	Pengelola Keuangan	-	1
	Pengadministrasi Umum	-	1
	Pengadministrasi Perkantoran	-	3
	Penata Layanan Operasional	-	1
	Pengelola Layanan Operasional	-	4
	Operator Layanan Operasional	-	9
	Satpam	-	2
	Pramubakti	-	2

Secara umum, jumlah pegawai yang tersedia telah mampu menopang pelaksanaan tugas pokok, namun masih terdapat tantangan dalam hal kesesuaian kompetensi dengan kebutuhan jabatan, pemerataan beban kerja, serta optimalisasi pemanfaatan tenaga fungsional. Kondisi ini menuntut adanya penataan kelembagaan yang lebih sistematis agar setiap pegawai dapat berkontribusi secara maksimal sesuai dengan bidang keahlian dan tanggung jawabnya.

Sebagai acuan pengembangan kelembagaan, telah disusun peta jabatan yang menggambarkan kondisi ideal sumber daya manusia untuk mencapai tujuan organisasi. Peta Jabatan tersebut memuat struktur jabatan, uraian tugas, serta jumlah formasi yang diperlukan pada setiap unit kerja. Dengan adanya peta jabatan, organisasi memiliki pedoman yang jelas dalam melakukan penataan, rekrutmen, pengembangan kompetensi, serta evaluasi kinerja pegawai.

Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera I			
Kelompok Jabatan Fungsional	K	B	F
JF Penata Kelola Perumahan Ahli Madya	7	2	5
JF Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Madya	2	0	2
JF Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya	1	1	0
Jumlah Terpenuhi/Kebutuhan	10	3	7

Seksi Pelaksanaan Wilayah I	K	B	F
Kepala Seksi Wilayah I	1	1	0
JF Penata Kelola Perumahan Ahli Muda	8	3	5
JF Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Muda	8	0	8
JF Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama	14	7	7
JF Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Pertama	10	8	2
Jumlah Terpenuhi/Kebutuhan	41	19	22

Seksi Pelaksanaan Wilayah II	K	B	F
Kepala Seksi Wilayah II	1	1	0
JF Penata Kelola Perumahan Ahli Muda	8	2	6
JF Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Muda	8	0	8
JF Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama	14	7	7
JF Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Pertama	10	8	2
Jumlah Terpenuhi/Kebutuhan	41	18	23

Subbag. Umum dan Tata Usaha	K	B	F
Kepala Subbagian Umum dan Tata Usaha	1	1	0
JF Arsiparis Ahli Muda	3	0	3
JF Arsiparis Ahli Pertama*	8	5	3
JF Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	3	1	2
JF Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	7	2	5
JF Pranata Keuangan APBN Terampil	4	2	2
JF Pranata Komputer Ahli Pertama	3	0	3
JF Pranata Komputer Terampil*	3	1	2
JF Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	3	0	3
JF Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama*	4	1	3
JF Analisis Hukum Ahli Pertama	3	0	3
Penata Layanan Operasional*	3	1	2
Pengelola Layanan Operasional*	6	4	2
Pengadministrasi Perkantoran*	5	3	2
Operator Layanan Operasional*	15	13	2
Jumlah Terpenuhi/Kebutuhan	71	34	37

Keterangan	
Perencanaan Kebutuhan	Jumlah
(K) Kebutuhan Ideal	163
(B) Eksisting / Pegawai saat ini	74
(F) Formasi	89

Gambar 3.4. Peta Jabatan BP3KP Sumatera I

Kondisi ideal yang tercermin dalam peta jabatan diharapkan mampu:

- Menjamin kesesuaian antara jumlah dan kualifikasi pegawai dengan kebutuhan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera I.
- Meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas melalui distribusi beban kerja yang proporsional.
- Mendorong profesionalisme dan akuntabilitas pegawai dalam mendukung pencapaian visi dan misi.
- Memperkuat kapasitas kelembagaan dalam menghadapi dinamika kebijakan dan tuntutan pelayanan publik.

Dengan demikian, pengelolaan sumber daya manusia pada Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera I tidak hanya berorientasi pada kondisi eksisting, tetapi juga diarahkan pada pencapaian kondisi ideal sebagaimana tergambar dalam peta jabatan. Hal ini menjadi landasan strategis bagi penguatan kelembagaan yang adaptif, efektif, dan berdaya saing.



BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. Target Kinerja

Untuk menjalankan kebijakan-kebijakan bidang penyediaan perumahan di atas, Program Perumahan dan Kawasan Permukiman yang ditetapkan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman yang memiliki sasaran program dan sasaran kegiatan yang meliputi output kegiatan sebagai berikut:

Tabel 4.1. Rekapitulasi Target Kinerja BP3KP Sumatera I

SASARAN PROGRAM / KEGIATAN / RINCIAN OUTPUT	2025 - 2029
Meningkatnya Hunian Layak	
Penyelenggaraan Sistem dan Strategi	
Kebijakan teknis penyelenggaraan klinik perumahan dan kawasan permukiman	5 Rekomendasi Kebijakan
Data dan informasi penyelenggaraan kawasan permukiman	4 Dokumen
Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Tematik Penyelenggaraan Kawasan Permukiman dan Akuntabilitas Kinerja	2 Laporan
Pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kawasan permukiman	4 Laporan
Koordinasi penyelenggaraan perumahan perdesaan	1 Kegiatan
Kebijakan, kemitraan, strategi, dan program prioritas penyelenggaraan perumahan perdesaan	4 Rekomendasi Kebijakan
Data dan informasi penyelenggaraan perumahan perdesaan	4 Dokumen
Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan perumahan perdesaan	9 Laporan
Rekomendasi kebijakan, strategi, pemrograman, anggaran dan kemitraan penyelenggaraan perumahan perkotaan	4 Rekomendasi Kebijakan
Pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan perumahan perkotaan	8 Laporan
Penyelenggaraan Penyiapan Lahan dan Prasarana, Sarana, Utilitas Umum	
Rumah yang mendapat pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum	484 Unit
Teknis penyiapan lahan dan PSU	3 Dokumen
Dukungan teknis penyiapan lahan dan perizinan perumahan perdesaan	4 Dokumen
Dukungan teknis penghunian perumahan perdesaan	4 Dokumen
Program, anggaran, dan rencana teknis penyiapan lahan, perizinan dan penghunian di bidang perumahan perkotaan	4 Rekomendasi Kebijakan
Penyediaan Rumah Layak Huni	
Jumlah unit rumah swadaya	23.727 Unit

SASARAN PROGRAM / KEGIATAN / RINCIAN OUTPUT	2025 - 2029
Rumah khusus yang terbangun	4.284 Unit
Rumah susun yang terbangun	924 Unit
Penyiapan Penanganan Kumuh dan Pengembangan Kawasan Permukiman	4 Laporan
Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Rusun, Peningkatan Kualitas dan Penanganan Kumuh	2 Laporan
Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pembangunan perumahan perdesaan	4 Laporan
Penyelenggaraan pembangunan perumahan perdesaan	4 Rekomendasi Kebijakan
Penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan perdesaan	4 Rekomendasi Kebijakan
Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan perdesaan	2 Laporan
Penyelenggaraan pembangunan perumahan perkotaan	4 Rekomendasi Kebijakan
Penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan perkotaan	4 Rekomendasi Kebijakan
Penyelenggaraan Pembiayaan Perumahan	
Penyelenggaraan pembiayaan perumahan perkotaan	4 Rekomendasi Kebijakan
Meningkatnya Penanganan Permukiman Kumuh	
Penanganan Permukiman Kumuh	
Permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu	35,00 Hektar
Meningkatnya tata kelola dan pengendalian risiko penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman	
Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Perumahan dan Kawasan Permukiman	
Pemantauan dan pendampingan tata kelola dan pengendalian risiko	4 Laporan
Pembangunan dan penerapan zona integritas	5 Rekomendasi Kebijakan
Penerapan Manajemen Risiko	5 Rekomendasi Kebijakan
Pelaksanaan Sistem Manajemen Anti Penyuapan	4 Rekomendasi Kebijakan
Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen BP3KP Sumatera I	
Dukungan Manajemen Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera I	
Layanan Perkantoran (Sekretariat Jenderal)	10 Layanan
Layanan Umum (Sekretariat Jenderal)	10 Layanan
Layanan Umum (Ditjen KP)	8 Layanan
Layanan Umum (Ditjen Perumahan Perdesaan)	8 Layanan
Layanan Umum (Ditjen Perumahan Perkotaan)	8 Layanan
Layanan Sarana Internal (Sekretariat Jenderal)	10 Layanan
Layanan Data dan Informasi (Ditjen KP)	4 Layanan
Layanan Data dan Informasi (Ditjen Perumahan Perdesaan)	4 Layanan
Layanan Data dan Informasi (Ditjen Perumahan Perkotaan)	4 Layanan
Layanan BMN (Ditjen KP)	4 Layanan
Layanan BMN (Ditjen Perumahan Perkotaan)	4 Layanan

SASARAN PROGRAM / KEGIATAN / RINCIAN OUTPUT	2025 - 2029
Layanan Reformasi Kinerja (Ditjen Perumahan Perkotaan)	8 Layanan

4.2. Kerangka Pendanaan

Untuk mencapai sasaran program dan kegiatan sesuai dengan target yang direncanakan pada Rencana Strategis Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera I Tahun 2025 – 2029, dibutuhkan pendanaan sebesar Rp4.724.711.509.000 dan penjabarannya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.2. Rekapitulasi Kerangka Pendanaan BP3KP Sumatera I

SASARAN PROGRAM / KEGIATAN / RINCIAN OUTPUT	2025 – 2029 (dalam ribu rupiah)
Meningkatnya Hunian Layak	
Penyelenggaraan Sistem dan Strategi	7.612.077
Penyelenggaraan Penyiapan Lahan dan Prasarana, Sarana, Utilitas Umum	15.478.047
Penyediaan Rumah Layak Huni	4.411.471.149
Penyelenggaraan Pembiayaan Perumahan	325.187
Meningkatnya Penanganan Permukiman Kumuh	
Penanganan Permukiman Kumuh	77.875.000
Meningkatnya tata kelola dan pengendalian risiko penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman	
Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Perumahan dan Kawasan Permukiman	3.589.891
Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen BP3KP Sumatera I	
Dukungan Manajemen Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera I	208.360.159
Total	4.724.711.509

The background of the entire page is a light blue map of a city grid, showing streets and building footprints. A white rectangular box is positioned on the left side of the page, containing the chapter title.

BAB V

PENUTUP

BAB V PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera I Tahun 2025–2029 merupakan pedoman yang akan dijabarkan ke dalam pelaksanaan program dan kegiatan bagi seluruh Satuan Kerja di lingkungan Balai. Dokumen ini mendukung kebijakan pengembangan perumahan melalui peningkatan akses masyarakat terhadap hunian layak dan terjangkau, baik melalui penyediaan rumah baru maupun peningkatan kualitas RTLH secara kolaboratif.

Pencapaian sasaran Rencana Strategis Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera I Tahun 2025–2029 memerlukan dukungan pendanaan yang cukup besar. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kemitraan antara pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta, termasuk penguatan kerja sama pemerintah dengan badan usaha, guna mengembangkan alternatif pembiayaan pembangunan perumahan.

Dalam konteks tersebut, tugas pemerintah adalah menciptakan regulasi yang sehat, membangun iklim yang kondusif, serta mendorong pengembangan inovasi dan teknologi. Selain itu, pemerintah bersama pemerintah daerah, masyarakat, dan dunia usaha perlu meningkatkan kapasitas kelembagaan serta memperkuat peran badan perumahan umum dalam penyelenggaraan perumahan dan permukiman.

Untuk mencapai sasaran tersebut, diperlukan koordinasi, konsolidasi, dan sinergi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, serta badan usaha agar seluruh sumber daya dapat dimanfaatkan secara optimal dan menghasilkan kinerja maksimal dalam meningkatkan ketersediaan serta kualitas pelayanan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan.

Pelaksanaan Perencanaan yang sudah disusun dalam Rencana Strategis ini senantiasa dikawal melalui mekanisme evaluasi yang terstruktur, sistematis, dan berbasis data. Evaluasi dilakukan secara berkala untuk menilai kesesuaian antara rencana dan capaian, sekaligus mengidentifikasi faktor penghambat maupun pendukung keberhasilan. Proses evaluasi dilakukan secara sistematis melalui mekanisme monitoring program dan kegiatan yang dilaporkan secara triwulanan maupun tahunan, terintegrasi dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Evaluasi ini mencakup pengukuran indikator kinerja

yang telah ditetapkan, sehingga capaian dapat dinilai secara objektif dan terukur. Selanjutnya, dilakukan analisis kesenjangan antara target dan realisasi guna mengidentifikasi akar masalah serta merumuskan langkah korektif yang diperlukan. Hasil evaluasi menjadi dasar pemberian umpan balik bagi perbaikan perencanaan berikutnya, sehingga tercipta siklus *continuous improvement* dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi. Seluruh proses dilaksanakan dengan menjunjung tinggi prinsip transparansi dan akuntabilitas, melalui dokumentasi hasil evaluasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara kelembagaan.

Dengan mekanisme evaluasi tersebut, Rencana Strategis Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera I diharapkan mampu menjadi instrumen kendali manajemen yang efektif, memperkuat budaya kinerja, serta memastikan setiap program dan kegiatan berjalan sesuai arah kebijakan yang telah ditetapkan. Konsistensi dalam pelaksanaan dan evaluasi akan menjadi kunci keberhasilan unit kerja dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis unit kerja, unit organisasi, serta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

The background of the entire page is a light blue, semi-transparent map of a city street grid. The map shows a complex network of streets, including a prominent circular intersection in the lower center. The map is oriented with the top of the page as the top of the map.

LAMPIRAN

Matriks Kinerja Pendanaan

No	PROGRAM / KEGIATAN	SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Ribu Rp)					
			2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL	2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
PROGRAM: PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN														
SASARAN STRATEGIS: Meningkatnya Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Yang Efisien, Layak, dan Terjangkau, dan Berkelanjutan														
INDIKATOR SASARAN STRATEGIS:														
1	Persentase jumlah rumah tangga dengan akses hunian layak dan terjangkau yang difasilitasi													
SASARAN PROGRAM: Meningkatnya Hunian Layak														
KEGIATAN: Penyelenggaraan Sistem dan Strategi														
SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam pembangunan perumahan di BP3KP Sumatera I														
	OUTPUT KEGIATAN:													
1	Jumlah laporan penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan klinik perumahan dan kawasan permukiman	Rekomendasi Kebijakan	1	1	1	1	1	5	50.000	175.000	184.450	194.410	204.908	808.769
2	Jumlah dokumen data dan informasi penyelenggaraan kawasan permukiman	Dokumen	-	1	1	1	1	4	-	60.000	63.240	66.655	70.254	260.149
3	Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Tematik Penyelenggaraan Kawasan Permukiman dan Akuntabilitas Kinerja	Laporan	2	-	-	-	-	2	107.317	-	-	-	-	107.317

No	PROGRAM / KEGIATAN	SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Ribu Rp)					
			2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL	2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL
4	Jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kawasan permukiman	Laporan	-	1	1	1	1	4	-	32.632	34.394	36.251	38.208	141.485
5	Jumlah kegiatan koordinasi penyelenggaraan perumahan perdesaan	Kegiatan	1	-	-	-	-	1	185.543	-	-	-	-	185.543
6	Jumlah dokumen kebijakan, kemitraan, strategi, dan program prioritas penyelenggaraan perumahan perdesaan	Rekomendasi Kebijakan	-	1	1	1	1	4	-	363.141	382.751	403.419	425.204	1.574.515
7	Jumlah dokumen data dan informasi penyelenggaraan perumahan perdesaan	Dokumen	-	1	1	1	1	4	-	156.201	164.636	173.526	182.897	677.260
8	Jumlah laporan kegiatan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan perumahan perdesaan	Laporan	1	2	2	2	2	9	130.497	509.478	536.990	565.987	596.551	2.339.503
9	Jumlah rekomendasi kebijakan, strategi, pemrograman, anggaran dan kemitraan penyelenggaraan perumahan perkotaan	Rekomendasi Kebijakan	-	1	1	1	1	4	-	160.000	168.640	177.747	187.345	693.731
10	Jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan perumahan perkotaan	Laporan	-	2	2	2	2	8	-	190.000	200.260	211.074	222.472	823.806

No	PROGRAM / KEGIATAN	SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Ribu Rp)					
			2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL	2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL
KEGIATAN: Penyelenggaraan Penyiapan Lahan dan Prasarana, Sarana, Utilitas Umum														
SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya akses penyiapan lahan, perizinan dan penghunian perumahan di BP3KP Sumatera I														
	OUTPUT KEGIATAN:													
1	Jumlah rumah yang mendapat pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum	Unit	-	121	121	121	121	484	-	1.773.489	1.844.146	1.928.934	2.041.985	7.588.555
2	Jumlah dokumen teknis penyiapan lahan dan PSU	Dokumen	-	-	1	1	1	3	-	-	88.900	93.701	98.760	281.361
3	Jumlah dokumen dukungan teknis penyiapan lahan dan perizinan perumahan perdesaan	Dokumen	-	1	1	1	1	4	-	1.449.686	1.527.969	1.610.479	1.697.445	6.285.580
4	Jumlah dokumen dukungan teknis penghunian perumahan perdesaan	Dokumen	-	1	1	1	1	4	-	220.029	231.911	244.434	257.633	954.006
5	Jumlah rekomendasi kebijakan program, anggaran, dan rencana teknis penyiapan lahan, perizinan dan penghunian di bidang perumahan perkotaan	Rekomendasi Kebijakan	-	1	1	1	1	4	-	85.000	89.590	94.428	99.527	368.545
KEGIATAN: Penyediaan Rumah Layak Huni														
SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni														
	OUTPUT KEGIATAN:													
1	Jumlah unit rumah swadaya* * Pendanaan dilaksanakan melalui	Unit	1.979	5.437	5.437	5.437	5.437	23.727	67.286.000	131.616.178	138.181.355	144.746.533	151.311.710	633.141.776

No	PROGRAM / KEGIATAN	SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Ribu Rp)					
			2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL	2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL
	DIPA Ditjen KP, Ditjen Perumahan Perdesaan, dan Ditjen Perumahan Perkotaan													
2	Jumlah rumah khusus yang terbangun* * Pendanaan dilaksanakan melalui DIPA Ditjen KP, Ditjen Perumahan Perdesaan, dan Ditjen Perumahan Perkotaan	Unit	-	1.071	1.071	1.071	1.071	4.284	-	461.541.694	475.365.087	497.950.306	520.535.525	1.955.392.612
3	Jumlah rumah susun yang terbangun* * Pendanaan dilaksanakan melalui DIPA Ditjen KP, Ditjen Perumahan Perdesaan, dan Ditjen Perumahan Perkotaan	Unit	44	220	220	220	220	924	88.000.000	414.155.460	417.626.000	436.568.000	455.510.000	1.811.859.460
4	Jumlah Dokumen Teknis Penyiapan Penanganan Kumuh dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Laporan	-	1	1	1	1	4	-	88.500	93.279	98.316	103.625	383.720
5	Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Rusun, Peningkatan Kualitas dan Penanganan Kumuh	Laporan	2	-	-	-	-	2	10.614	-	-	-	-	10.614
6	Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan	Laporan	-	1	1	1	1	4	-	379.856	400.368	421.988	444.775	1.646.988

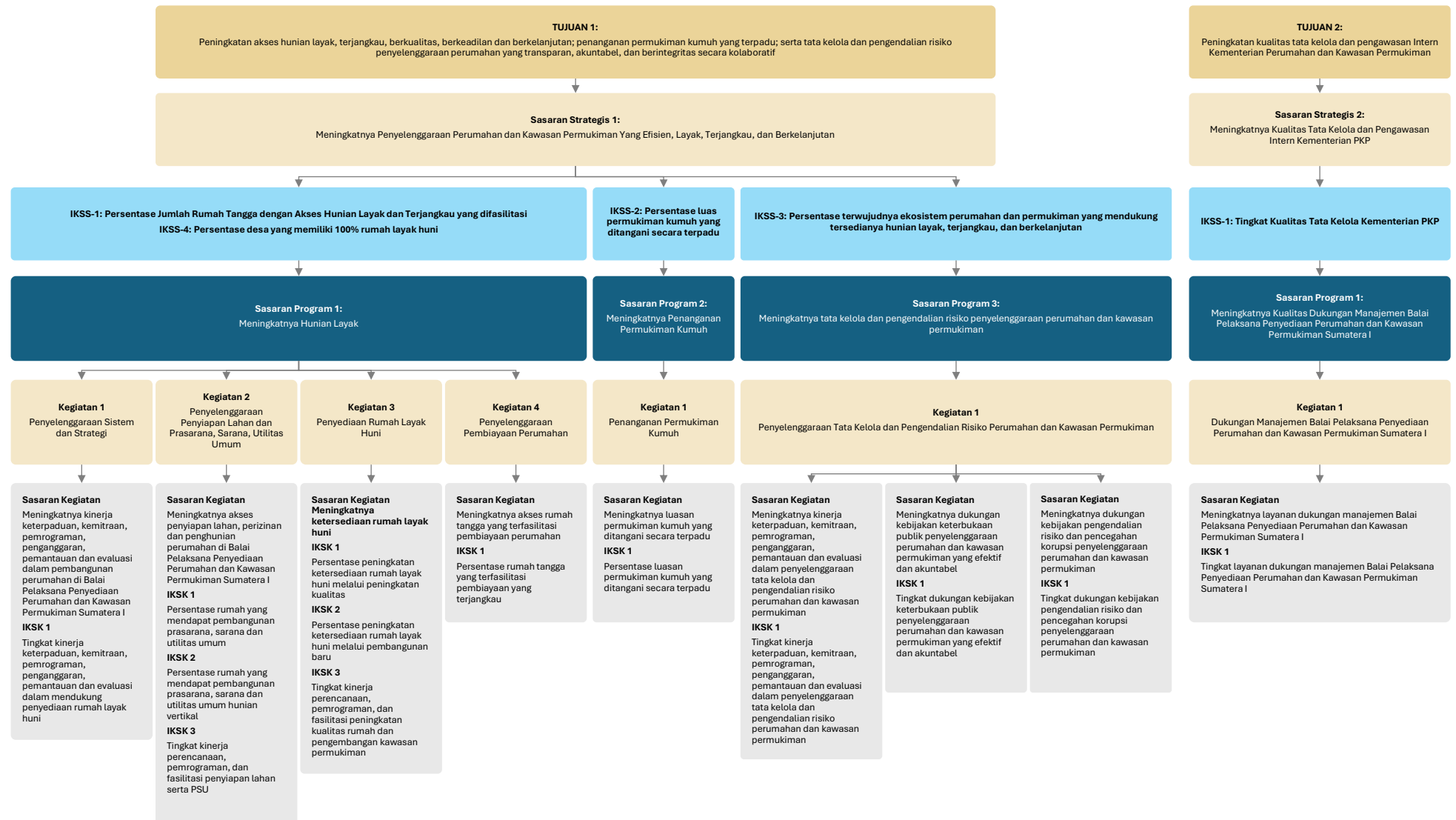
No	PROGRAM / KEGIATAN	SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Ribu Rp)					
			2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL	2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL
	pembangunan perumahan perdesaan													
7	Jumlah rekomendasi kebijakan penyelenggaraan pembangunan perumahan perdesaan	Rekomendasi Kebijakan	-	1	1	1	1	4	-	180.000	189.720	199.965	210.763	780.448
8	Jumlah rekomendasi kebijakan penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan perdesaan	Rekomendasi Kebijakan	-	1	1	1	1	4	-	810.000	853.740	899.842	948.433	3.512.015
9	Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan perdesaan	Laporan	2	-	-	-	-	2	68.633	-	-	-	-	68.633
10	Jumlah rekomendasi kebijakan penyelenggaraan pembangunan perumahan perkotaan	Rekomendasi Kebijakan	-	1	1	1	1	4	-	70.000	73.780	77.764	81.963	303.508
11	Jumlah rekomendasi kebijakan penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan perkotaan	Rekomendasi Kebijakan	-	1	1	1	1	4	-	1.008.200	1.062.643	1.120.026	1.180.507	4.371.375
KEGIATAN: Penyelenggaraan Pembiayaan Perumahan														
SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya Akses Rumah Tangga yang Terfasilitasi Pembiayaan Perumahan														
OUTPUT KEGIATAN:														
1	Jumlah rekomendasi kebijakan penyelenggaraan pembiayaan perumahan perkotaan	Rekomendasi Kebijakan	-	1	1	1	1	4	-	75.000	79.050	83.319	87.818	325.187

No	PROGRAM / KEGIATAN	SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Ribu Rp)					
			2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL	2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL
INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS:														
2	Persentase luas permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu													
SASARAN PROGRAM: Meningkatnya Penanganan Permukiman Kumuh														
KEGIATAN: Penanganan Permukiman Kumuh														
SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya luasan permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu														
	OUTPUT KEGIATAN:													
1	Luas permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu	Hektar	-	15,00	-	20,00	-	35,00	-	31.575.000	-	46.300.000	-	77.875.000
INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS:														
3	Persentase terwujudnya ekosistem perumahan dan permukiman yang mendukung tersedianya hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan													
SASARAN PROGRAM: Meningkatnya tata kelola dan pengendalian risiko penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman														
KEGIATAN: Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Perumahan dan Kawasan Permukiman														
SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan tata kelola dan pengendalian risiko perumahan dan kawasan permukiman														
	OUTPUT KEGIATAN:													
1	Jumlah laporan pemantauan dan pendampingan tata kelola dan pengendalian risiko	Laporan	-	1	1	1	1	4	-	52.600	75.000	100.000	125.000	352.600
SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya dukungan kebijakan keterbukaan publik penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang efektif dan akuntabel														
	OUTPUT KEGIATAN:													
1	Jumlah pembangunan dan penerapan zona integritas	Rekomendasi Kebijakan	1	1	1	1	1	5	129.232	182.150	200.365	220.410	242.451	974.608
SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya dukungan kebijakan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman														
	OUTPUT KEGIATAN:													

No	PROGRAM / KEGIATAN	SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Ribu Rp)					
			2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL	2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL
1	Jumlah Penerapan Manajemen Risiko	Rekomendasi Kebijakan	1	1	1	1	1	5	174.233	225.000	247.500	272.250	299.475	1.218.458
2	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Anti Penyusunan	Rekomendasi Kebijakan	-	1	1	1	1	4	-	225.000	247.500	272.250	299.475	1.044.225
SASARAN STRATEGIS 2: Meningkatnya Kualitas Tata Kelola dan Pengawasan Intern Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman														
INDIKATOR SASARAN STRATEGIS:														
1	Tingkat kualitas tata kelola Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman													
SASARAN PROGRAM: Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen BP3KP Sumatera I														
KEGIATAN: Dukungan Manajemen Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera I														
SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya layanan dukungan manajemen Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera I														
	OUTPUT KEGIATAN:													
1	Jumlah Layanan Perkantoran (Sekretariat Jenderal)	Layanan	2	2	2	2	2	10	15.772.421	43.178.723	45.337.659	47.604.542	49.984.769	201.878.116
2	Jumlah Layanan Umum (Sekretariat Jenderal)	Layanan	2	2	2	2	2	10	25.773	84.300	88.515	92.941	97.588	389.116
3	Jumlah Layanan Umum (Ditjen KP)	Layanan	-	2	2	2	2	8	-	190.500	200.787	211.629	223.057	825.974
4	Jumlah Layanan Umum (Ditjen Perumahan Perdesaan)	Layanan	-	2	2	2	2	8	-	252.000	265.608	279.951	295.068	1.092.627
5	Jumlah Layanan Umum (Ditjen Perumahan Perkotaan)	Layanan	-	2	2	2	2	8	-	175.000	184.450	194.410	204.908	758.769
6	Jumlah Layanan Sarana Internal (Sekretariat Jenderal)	Layanan	2	2	2	2	2	10	37.143	393.261	412.924	433.571	455.249	1.732.148
7	Jumlah Layanan Data dan Informasi (Ditjen KP)	Layanan	-	1	1	1	1	4	-	16.675	17.575	18.525	19.525	72.300

No	PROGRAM / KEGIATAN	SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Ribu Rp)					
			2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL	2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL
8	Jumlah Layanan Data dan Informasi (Ditjen Perumahan Perdesaan)	Layanan	-	1	1	1	1	4	-	14.131	14.894	15.698	16.546	61.269
9	Jumlah Layanan Data dan Informasi (Ditjen Perumahan Perkotaan)	Layanan	-	1	1	1	1	4	-	70.000	73.780	77.764	81.963	303.508
10	Jumlah Layanan BMN (Ditjen KP)	Layanan	-	1	1	1	1	4	-	17.450	18.392	19.385	20.432	75.660
11	Jumlah Layanan BMN (Ditjen Perumahan Perkotaan)	Layanan	-	1	1	1	1	4	-	70.000	73.780	77.764	81.963	303.508
12	Jumlah Layanan Reformasi Kinerja (Ditjen Perumahan Perkotaan)	Layanan	-	2	2	2	2	8	-	200.000	210.800	222.183	234.181	867.164
TOTAL									171.977.406	1.092.021.334	1.087.112.428	1.184.380.378	1.189.219.963	4.724.711.509

Pohon Kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera I



Metode Perhitungan

SASARAN STRATEGIS / SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA / SATUAN		OUTPUT KEGIATAN		METODE PERHITUNGAN		TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
(1)		(2)		(3)		(4)		(5)	(6)
PROGRAM: PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN									
SASARAN STRATEGIS 1: Meningkatnya Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Yang Efisien, Layak, dan Terjangkau, dan Berkelanjutan									
SASARAN PROGRAM 1: Meningkatnya Hunian Layak									
Kegiatan 1: Penyelenggaraan Sistem dan Strategi									
SK 1	Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, pemantauan dan evaluasi dalam pembangunan perumahan di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera I	IKSK 1	Tingkat kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, pemantauan dan evaluasi dalam mendukung penyediaan rumah layak huni	OK 1	Jumlah laporan penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan klinik perumahan dan kawasan permukiman	Dihitung dari realisasi jumlah rekomendasi kebijakan teknis penyelenggaraan klinik perumahan dan kawasan permukiman oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera I Capaian = Jumlah realisasi rekomendasi kebijakan teknis penyelenggaraan klinik perumahan dan kawasan permukiman di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera I Target output per tahun sebagai berikut: 2025 : 1 rekomendasi kebijakan 2028 : 1 rekomendasi kebijakan 2026 : 1 rekomendasi kebijakan 2029 : 1 rekomendasi kebijakan 2027 : 1 rekomendasi kebijakan Total : 5 rekomendasi kebijakan		Non Kumulatif	Internal
				OK 2	Jumlah dokumen data dan informasi penyelenggaraan kawasan permukiman	Dihitung dari realisasi jumlah dokumen data dan informasi penyelenggaraan kawasan permukiman oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera I Capaian = Jumlah realisasi dokumen data dan informasi penyelenggaraan kawasan permukiman di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera I		Non Kumulatif	Internal

SASARAN STRATEGIS / SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA / SATUAN		OUTPUT KEGIATAN		METODE PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
						Target output per tahun sebagai berikut: 2025 : - dokumen 2027 : 1 dokumen 2029 : 1 dokumen 2026 : 1 dokumen 2028 : 1 dokumen Total : 4 dokumen		
				OK 3	Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Tematik Penyelenggaraan Kawasan Permukiman dan Akuntabilitas Kinerja	Dihitung dari realisasi jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan tematik penyelenggaraan kawasan permukiman dan akuntabilitas kinerja oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera I Capaian = Jumlah realisasi laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan tematik penyelenggaraan kawasan permukiman dan akuntabilitas kinerja di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera I Target output per tahun sebagai berikut: 2025 : 2 laporan 2027 : - laporan 2029 : - laporan 2026 : - laporan 2028 : - laporan Total : 2 laporan		
				OK 4	Jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kawasan permukiman	Dihitung dari realisasi jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kawasan permukiman oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera I Capaian = Jumlah realisasi laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kawasan permukiman di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera I Target output per tahun sebagai berikut: 2025 : - laporan 2027 : 1 laporan 2029 : 1 laporan 2026 : 1 laporan 2028 : 1 laporan Total : 4 laporan	Non Kumulatif	Internal
				OK 5	Jumlah kegiatan koordinasi penyelenggaraan perumahan perdesaan	Dihitung dari realisasi jumlah kegiatan koordinasi penyelenggaraan perumahan perdesaan oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera I	Non Kumulatif	Internal

SASARAN STRATEGIS / SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA / SATUAN		OUTPUT KEGIATAN		METODE PERHITUNGAN			TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
						Capaian = Jumlah realisasi kegiatan koordinasi penyelenggaraan perumahan perdesaan di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera I Target output per tahun sebagai berikut: 2025 : 1 kegiatan 2027 : - kegiatan 2029 : - kegiatan 2026 : - kegiatan 2028 : - kegiatan Total : 1 kegiatan				
				OK 6	Jumlah dokumen kebijakan, kemitraan, strategi, dan program prioritas penyelenggaraan perumahan perdesaan	Dihitung dari realisasi jumlah dokumen kebijakan, kemitraan, strategi, dan program prioritas penyelenggaraan perumahan perdesaan oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera I Capaian = Jumlah realisasi rekomendasi kebijakan dokumen kebijakan, kemitraan, strategi, dan program prioritas penyelenggaraan perumahan perdesaan di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera I Target output per tahun sebagai berikut: 2025 : - rekomendasi kebijakan 2028 : 1 rekomendasi kebijakan 2026 : 1 rekomendasi kebijakan 2029 : 1 rekomendasi kebijakan 2027 : 1 rekomendasi kebijakan Total : 4 rekomendasi kebijakan			Non Kumulatif	Internal
				OK 7	Jumlah dokumen data dan informasi penyelenggaraan perumahan perdesaan	Dihitung dari realisasi jumlah dokumen data dan informasi penyelenggaraan perumahan perdesaan oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera I Capaian = Jumlah realisasi dokumen data dan informasi penyelenggaraan perumahan perdesaan di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera I Target output per tahun sebagai berikut: 2025 : - dokumen 2027 : 1 dokumen 2029 : 1 dokumen 2026 : 1 dokumen 2028 : 1 dokumen Total : 4 dokumen			Non Kumulatif	Internal

SASARAN STRATEGIS / SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA / SATUAN		OUTPUT KEGIATAN	METODE PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
				OK 8	Jumlah laporan kegiatan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan perumahan perdesaan Dihitung dari realisasi jumlah laporan kegiatan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan perumahan perdesaan oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera I Capaian = Jumlah realisasi laporan kegiatan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan perumahan perdesaan di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera I Target output per tahun sebagai berikut: 2025 : 1 laporan 2027 : 2 laporan 2029 : 2 laporan 2026 : 2 laporan 2028 : 2 laporan Total : 9 laporan	Non Kumulatif	Internal
				OK 9	Jumlah rekomendasi kebijakan, strategi, pemrograman, anggaran dan kemitraan penyelenggaraan perumahan perkotaan Dihitung dari realisasi jumlah rekomendasi kebijakan, strategi, pemrograman, anggaran dan kemitraan penyelenggaraan perumahan perkotaan oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera I Capaian = Jumlah realisasi rekomendasi kebijakan, strategi, pemrograman, anggaran dan kemitraan penyelenggaraan perumahan perkotaan di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera I Target output per tahun sebagai berikut: 2025 : - rekomendasi kebijakan 2028 : 1 rekomendasi kebijakan 2026 : 1 rekomendasi kebijakan 2029 : 1 rekomendasi kebijakan 2027 : 1 rekomendasi kebijakan Total : 4 rekomendasi kebijakan	Non Kumulatif	Internal
				OK 10	Jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan perumahan perkotaan Dihitung dari realisasi jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan perumahan perkotaan oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera I	Non Kumulatif	Internal

SASARAN STRATEGIS / SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA / SATUAN		OUTPUT KEGIATAN		METODE PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
						Capaian = Jumlah realisasi laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan perumahan perkotaan di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera I Target output per tahun sebagai berikut: 2025 : - laporan 2027 : 2 laporan 2029 : 2 laporan 2026 : 2 laporan 2028 : 2 laporan Total : 8 laporan		
Kegiatan 2: Penyelenggaraan Penyiapan Lahan dan Prasarana, Sarana, Utilitas Umum								
SK 1	Meningkatnya akses penyiapan lahan, perizinan dan penghunian perumahan di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera I	IKSK 1	Persentase rumah yang mendapat pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum	OK 1	Jumlah rumah yang mendapat pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum (Pendanaan dilaksanakan melalui DIPA Ditjen KP, Ditjen Perumahan Perdesaan, dan Ditjen Perumahan Perkotaan)	Dihitung dari realisasi jumlah rumah yang mendapat pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera I Capaian = Jumlah realisasi rumah yang mendapat pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera I Target output per tahun sebagai berikut: 2025 : - unit 2027 : 121 unit 2029 : 121 unit 2026 : 121 unit 2028 : 121 unit Total : 484 unit	Non Kumulatif	Internal
		IKSK 2	Persentase rumah yang mendapat pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum hunian vertikal					
		IKSK 3	Tingkat kinerja perencanaan, pemrograman, dan fasilitasi	OK 2	Jumlah dokumen teknis penyiapan lahan dan PSU	Dihitung dari realisasi jumlah dokumen teknis penyiapan lahan dan PSU oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera I	Non Kumulatif	Internal

SASARAN STRATEGIS / SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA / SATUAN		OUTPUT KEGIATAN		METODE PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
			penyiapan lahan serta PSU			Capaian = Jumlah realisasi dokumen teknis penyiapan lahan dan PSU di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera I Target output per tahun sebagai berikut: 2025 : - dokumen 2027 : 1 dokumen 2029 : 1 dokumen 2026 : - dokumen 2028 : 1 dokumen Total : 3 dokumen		
				OK 3	Jumlah dokumen dukungan teknis penyiapan lahan dan perizinan perumahan perdesaan	Dihitung dari realisasi jumlah dokumen dukungan teknis penyiapan lahan dan perizinan perumahan perdesaan oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera I Capaian = Jumlah realisasi dokumen dukungan teknis penyiapan lahan dan perizinan perumahan perdesaan di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera I Target output per tahun sebagai berikut: 2025 : - dokumen 2027 : 1 dokumen 2029 : 1 dokumen 2026 : 1 dokumen 2028 : 1 dokumen Total : 4 dokumen	Non Kumulatif	Internal
				OK 4	Jumlah dokumen dukungan teknis penghunian perumahan perdesaan	Dihitung dari realisasi jumlah dokumen dukungan teknis penghunian perumahan perdesaan oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera I Capaian = Jumlah realisasi dokumen dukungan teknis penghunian perumahan perdesaan di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera I Target output per tahun sebagai berikut: 2025 : - dokumen 2027 : 1 dokumen 2029 : 1 dokumen 2026 : 1 dokumen 2028 : 1 dokumen Total : 4 dokumen	Non Kumulatif	Internal
				OK 5	Jumlah rekomendasi kebijakan program,	Dihitung dari realisasi jumlah rekomendasi kebijakan program, anggaran, dan rencana teknis penyiapan lahan, perizinan dan penghunian di bidang perumahan perkotaan oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera I	Non Kumulatif	Internal

SASARAN STRATEGIS / SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA / SATUAN		OUTPUT KEGIATAN		METODE PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
					anggaran, dan rencana teknis penyiapan lahan, perizinan dan penghunian di bidang perumahan perkotaan	Capaian = Jumlah realisasi rekomendasi kebijakan program, anggaran, dan rencana teknis penyiapan lahan, perizinan dan penghunian di bidang perumahan perkotaan di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera I Target output per tahun sebagai berikut: 2025 : - rekomendasi kebijakan 2028 : 1 rekomendasi kebijakan 2026 : 1 rekomendasi kebijakan 2029 : 1 rekomendasi kebijakan 2027 : 1 rekomendasi kebijakan Total : 4 rekomendasi kebijakan		
Kegiatan 3: Penyediaan Rumah Layak Huni								
SK 1	Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni	IKSK 1	Persentase peningkatan ketersediaan rumah layak huni melalui peningkatan kualitas	OK 1	Jumlah unit rumah swadaya (Pendanaan dilaksanakan melalui DIPA Ditjen KP, Ditjen Perumahan Perdesaan, dan Ditjen Perumahan Perkotaan)	Dihitung dari realisasi jumlah unit rumah swadaya oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera I Capaian = Jumlah realisasi jumlah unit rumah swadaya di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera I Target output per tahun sebagai berikut: 2025 : 1.979 unit 2027 : 5.437 unit 2029 : 5.437 unit 2026 : 5.437 unit 2028 : 5.437 unit Total : 23.727 unit	Non Kumulatif	Internal
		IKSK 2	Persentase peningkatan ketersediaan rumah layak huni melalui pembangunan baru	OK 2	Jumlah rumah khusus yang terbangun (Pendanaan dilaksanakan melalui DIPA Ditjen KP, Ditjen Perumahan Perdesaan, dan	Dihitung dari realisasi jumlah rumah khusus yang terbangun oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera I Capaian = Jumlah realisasi jumlah rumah khusus yang terbangun di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera I	Non Kumulatif	Internal

SASARAN STRATEGIS / SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA / SATUAN		OUTPUT KEGIATAN		METODE PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
					<i>Ditjen Perumahan Perkotaan)</i>	Target output per tahun sebagai berikut: 2025 : - unit 2027 : 1.071 unit 2029 : 1.071 unit 2026 : 1.071 unit 2028 : 1.071 unit Total : 4.284 unit		
				OK 3	Jumlah rumah susun yang terbangun <i>(Pendanaan dilaksanakan melalui DIPA Ditjen KP, Ditjen Perumahan Perdesaan, dan Ditjen Perumahan Perkotaan)</i>	Dihitung dari realisasi jumlah rumah susun yang terbangun oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera I Capaian = Jumlah realisasi jumlah rumah susun yang terbangun di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera I Target output per tahun sebagai berikut: 2025 : 44 unit 2027 : 220 unit 2029 : 220 unit 2026 : 220 unit 2028 : 220 unit Total : 924 unit	Non Kumulatif	Internal
		IKSK 3	Tingkat kinerja perencanaan, pemrograman, dan fasilitasi peningkatan kualitas rumah dan pengembangan kawasan permukiman	OK 4	Jumlah Dokumen Teknis Penyiapan Penanganan Kumuh dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Dihitung dari realisasi jumlah dokumen teknis penyiapan penanganan kumuh dan pengembangan kawasan permukiman oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera I Capaian = Jumlah realisasi laporan penyiapan penanganan kumuh dan pengembangan kawasan permukiman di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera I Target output per tahun sebagai berikut: 2025 : - laporan 2027 : 1 laporan 2029 : 1 laporan 2026 : 1 laporan 2028 : 1 laporan Total : 4 laporan	Non Kumulatif	Internal
				OK 5	Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Rusun, Peningkatan Kualitas dan	Dihitung dari realisasi jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pembangunan rusun, peningkatan kualitas dan penanganan kumuh oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera I Capaian = Jumlah realisasi laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pembangunan rusun, peningkatan kualitas dan penanganan	Non Kumulatif	Internal

SASARAN STRATEGIS / SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA / SATUAN		OUTPUT KEGIATAN		METODE PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
					Penanganan Kumuh	kumuh di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera I Target output per tahun sebagai berikut: 2025 : 2 laporan 2027 : - laporan 2029 : - laporan 2026 : - laporan 2028 : - laporan Total : 2 laporan		
				OK 6	Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pembangunan perumahan perdesaan	Dihitung dari realisasi jumlah laporan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pembangunan perumahan perdesaan oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera I Capaian = Jumlah realisasi laporan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pembangunan perumahan perdesaan di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera I Target output per tahun sebagai berikut: 2025 : - laporan 2027 : 1 laporan 2029 : 1 laporan 2026 : 1 laporan 2028 : 1 laporan Total : 4 laporan	Non Kumulatif	Internal
				OK 7	Jumlah rekomendasi kebijakan penyelenggaraan pembangunan perumahan perdesaan	Dihitung dari realisasi Jumlah rekomendasi kebijakan penyelenggaraan pembangunan perumahan perdesaan oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera I Capaian = Jumlah realisasi rekomendasi kebijakan penyelenggaraan pembangunan perumahan perdesaan di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera I Target output per tahun sebagai berikut: 2025 : - rekomendasi kebijakan 2028 : 1 rekomendasi kebijakan 2026 : 1 rekomendasi kebijakan 2029 : 1 rekomendasi kebijakan 2027 : 1 rekomendasi kebijakan Total : 4 rekomendasi kebijakan	Non Kumulatif	Internal

SASARAN STRATEGIS / SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA / SATUAN		OUTPUT KEGIATAN	METODE PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
				OK 8	Jumlah rekomendasi kebijakan penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan perdesaan Dihitung dari realisasi Jumlah rekomendasi kebijakan penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan perdesaan oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera I Capaian = Jumlah realisasi rekomendasi kebijakan penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan perdesaan di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera I Target output per tahun sebagai berikut: 2025 : - rekomendasi kebijakan 2028 : 1 rekomendasi kebijakan 2026 : 1 rekomendasi kebijakan 2029 : 1 rekomendasi kebijakan 2027 : 1 rekomendasi kebijakan Total : 4 rekomendasi kebijakan	Non Kumulatif	Internal
				OK 9	Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan perdesaan Dihitung dari realisasi Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan perdesaan oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera I Capaian = Jumlah realisasi laporan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan perdesaan di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera I Target output per tahun sebagai berikut: 2025 : 2 laporan 2027 : - laporan 2029 : - laporan 2026 : - laporan 2028 : - laporan Total : 2 laporan	Non Kumulatif	Internal
				OK 10	Jumlah rekomendasi kebijakan penyelenggaraan pembangunan perumahan perkotaan Dihitung dari realisasi rekomendasi kebijakan penyelenggaraan pembangunan perumahan perkotaan oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera I Capaian = Jumlah realisasi rekomendasi kebijakan penyelenggaraan pembangunan perumahan perkotaan di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera I	Non Kumulatif	Internal

SASARAN STRATEGIS / SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA / SATUAN		OUTPUT KEGIATAN		METODE PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
						Target output per tahun sebagai berikut: 2025 : - rekomendasi kebijakan 2028 : 1 rekomendasi kebijakan 2026 : 1 rekomendasi kebijakan 2029 : 1 rekomendasi kebijakan 2027 : 1 rekomendasi kebijakan Total : 4 rekomendasi kebijakan		
				OK 11	Jumlah rekomendasi kebijakan penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan perkotaan	Dihitung dari rekomendasi kebijakan penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan perkotaan oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera I Capaian = Jumlah realisasi rekomendasi kebijakan penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan perkotaan di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera I Target output per tahun sebagai berikut: 2025 : - rekomendasi kebijakan 2028 : 1 rekomendasi kebijakan 2026 : 1 rekomendasi kebijakan 2029 : 1 rekomendasi kebijakan 2027 : 1 rekomendasi kebijakan Total : 4 rekomendasi kebijakan	Non Kumulatif	Internal
Kegiatan 4:								
Penyelenggaraan Pembiayaan Perumahan								
SK 1	Meningkatnya Akses Rumah Tangga yang Terfasilitasi Pembiayaan Perumahan	IKSK 1	Persentase rumah tangga yang terfasilitasi pembiayaan yang terjangkau	OK 1	Jumlah rekomendasi kebijakan penyelenggaraan pembiayaan perumahan perkotaan	Dihitung dari rekomendasi kebijakan penyelenggaraan pembiayaan perumahan perkotaan oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera I Capaian = Jumlah realisasi rekomendasi kebijakan penyelenggaraan pembiayaan perumahan perkotaan di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera I Target output per tahun sebagai berikut: 2025 : - rekomendasi kebijakan 2028 : 1 rekomendasi kebijakan 2026 : 1 rekomendasi kebijakan 2029 : 1 rekomendasi kebijakan 2027 : 1 rekomendasi kebijakan Total : 4 rekomendasi kebijakan	Non Kumulatif	Internal

SASARAN STRATEGIS / SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA / SATUAN		OUTPUT KEGIATAN		METODE PERHITUNGAN			TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
SASARAN PROGRAM 2: Meningkatnya Penanganan Permukiman Kumuh										
Kegiatan 1: Penanganan Permukiman Kumuh										
SK 1	Meningkatnya luasan permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu	IKSK 1	Persentase luasan permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu	OK 1	Luas permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu (Pendanaan dilaksanakan melalui DIPA Ditjen KP, Ditjen Perumahan Perdesaan, dan Ditjen Perumahan Perkotaan)	Capaian dihitung dari perbandingan luasan kumuh tertangani terhadap target luasan kumuh yang ditangani setiap tahun. Capaian = Realisasi penanganan kumuh oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera I Target tahunan sebagai pelaksana (Ha): 2025 : - Ha 2027 : - Ha 2029 : - Ha 2026 : 15,00 Ha 2028 : 20,00 Ha Total : 35,00 Ha			Non Kumulatif	Internal
SASARAN PROGRAM 3: Meningkatnya tata kelola dan pengendalian risiko penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman										
Kegiatan 1: Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Perumahan dan Kawasan Permukiman										
SK 1	Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan tata kelola dan pengendalian risiko perumahan dan kawasan permukiman	IKSK 1	Tingkat kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan tata kelola dan pengendalian risiko perumahan dan kawasan permukiman	OK 1	Jumlah laporan pemantauan dan pendampingan tata kelola dan pengendalian risiko	Dihitung dari realisasi jumlah laporan pemantauan dan pendampingan tata kelola dan pengendalian risiko oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera I mulai tahun 2026 Capaian = Realisasi laporan pemantauan dan pendampingan tata kelola dan pengendalian risiko di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera I Target output per tahun sebagai berikut: 2026 : 1 laporan 2028 : 1 laporan Total : 4 Laporan 2027 : 1 laporan 2029 : 1 laporan			Non Kumulatif	Internal

SASARAN STRATEGIS / SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA / SATUAN		OUTPUT KEGIATAN		METODE PERHITUNGAN		TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
Kegiatan 2: Meningkatnya dukungan kebijakan keterbukaan publik penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang efektif dan akuntabel									
SK 1	Meningkatnya dukungan kebijakan keterbukaan publik penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang efektif dan akuntabel	IKSK 1	Tingkat dukungan kebijakan keterbukaan publik penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang efektif dan akuntabel	OK 1	Jumlah pembangunan dan penerapan zona integritas	Dihitung dari realisasi jumlah rekomendasi kebijakan penerapan zona integritas di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera I Capaian = Realisasi rekomendasi kebijakan pembangunan dan penerapan zona integritas di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera I Target output per tahun sebagai berikut: 2025 : 1 rekomendasi kebijakan 2028 : 1 rekomendasi kebijakan 2026 : 1 rekomendasi kebijakan 2029 : 1 rekomendasi kebijakan 2027 : 1 rekomendasi kebijakan Total : 5 rekomendasi kebijakan		Non Kumulatif	Internal
Kegiatan 3: Meningkatnya dukungan kebijakan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman									
SK 1	Meningkatnya dukungan kebijakan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman	IKSK 1	Tingkat dukungan kebijakan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman	OK 1	Jumlah Penerapan Manajemen Risiko	Dihitung dari realisasi jumlah penerapan Manajemen Risiko di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera I Capaian = Realisasi rekomendasi kebijakan penerapan Manajemen Risiko di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera I Target output per tahun sebagai berikut: 2025 : 1 rekomendasi kebijakan 2028 : 1 rekomendasi kebijakan 2026 : 1 rekomendasi kebijakan 2029 : 1 rekomendasi kebijakan 2027 : 1 rekomendasi kebijakan Total : 5 rekomendasi kebijakan		Non Kumulatif	Internal
				OK 2	Jumlah Pelaksanaan Sistem	Dihitung dari realisasi jumlah pelaksanaan Sistem Manajemen Anti Penyuapan di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera I		Non Kumulatif	Internal

SASARAN STRATEGIS / SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA / SATUAN		OUTPUT KEGIATAN		METODE PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
					Manajemen Anti Penyuapan	Capaian = Realisasi rekomendasi kebijakan pelaksanaan Sistem Manajemen Anti Penyuapan di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera I Target output per tahun sebagai berikut: 2025 : - rekomendasi kebijakan 2028 : 1 rekomendasi kebijakan 2026 : 1 rekomendasi kebijakan 2029 : 1 rekomendasi kebijakan 2027 : 1 rekomendasi kebijakan Total : 4 rekomendasi kebijakan		
PROGRAM: DUKUNGAN MANAJEMEN								
SASARAN STRATEGIS 2: Meningkatnya Kualitas Tata Kelola dan Pengawasan Intern Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman								
SASARAN PROGRAM 1: Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera I								
Kegiatan 1: Dukungan Manajemen Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera I								
SK 1	Meningkatnya layanan dukungan manajemen Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera I	IKSK 1	Tingkat layanan dukungan manajemen Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera I	OK 1	Jumlah Layanan Perkantoran (Sekretariat Jenderal)	Dihitung dari realisasi jumlah layanan perkantoran oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera I Capaian = Jumlah realisasi layanan perkantoran di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera I Target output per tahun sebagai berikut: 2025 : 2 layanan 2027 : 2 layanan 2029 : 2 layanan 2026 : 2 layanan 2028 : 2 layanan Total : 10 layanan	Non Kumulatif	Internal
				OK 2	Jumlah Layanan Umum (Sekretariat Jenderal)	Dihitung dari realisasi jumlah layanan umum oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera I Capaian = Jumlah realisasi layanan umum di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera I		

SASARAN STRATEGIS / SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA / SATUAN		OUTPUT KEGIATAN		METODE PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
						Target output per tahun sebagai berikut: 2025 : 2 layanan 2027 : 2 layanan 2029 : 2 layanan 2026 : 2 layanan 2028 : 2 layanan Total : 10 layanan		
				OK 3	Jumlah Layanan Umum (Ditjen Kawasan Permukiman)	Dihitung dari realisasi jumlah layanan umum oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera I Capaian = Jumlah realisasi layanan umum di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera I Target output per tahun sebagai berikut: 2025 : - layanan 2027 : 2 layanan 2029 : 2 layanan 2026 : 2 layanan 2028 : 2 layanan Total : 8 layanan	Non Kumulatif	Internal
				OK 4	Jumlah Layanan Umum (Ditjen Perumahan Perdesaan)	Dihitung dari realisasi jumlah layanan umum oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera I Capaian = Jumlah realisasi layanan umum di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera I Target output per tahun sebagai berikut: 2025 : - layanan 2027 : 2 layanan 2029 : 2 layanan 2026 : 2 layanan 2028 : 2 layanan Total : 8 layanan	Non Kumulatif	Internal
				OK 5	Jumlah Layanan Umum (Ditjen Perumahan Perkotaan)	Dihitung dari realisasi jumlah layanan umum oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera I Capaian = Jumlah realisasi layanan umum di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera I Target output per tahun sebagai berikut: 2025 : - layanan 2027 : 2 layanan 2029 : 2 layanan 2026 : 2 layanan 2028 : 2 layanan Total : 8 layanan	Non Kumulatif	Internal

SASARAN STRATEGIS / SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA / SATUAN		OUTPUT KEGIATAN	METODE PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
				OK 6 Jumlah Layanan Sarana Internal <i>(Sekretariat Jenderal)</i>	Dihitung dari realisasi jumlah layanan sarana internal oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera I Capaian = Jumlah realisasi layanan sarana internal di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera I Target output per tahun sebagai berikut: 2025 : 2 layanan 2027 : 2 layanan 2029 : 2 layanan 2026 : 2 layanan 2028 : 2 layanan Total : 10 layanan	Non Kumulatif	Internal
				OK 7 Jumlah Layanan Data dan Informasi <i>(Ditjen Kawasan Permukiman)</i>	Dihitung dari realisasi jumlah layanan data dan informasi oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera I Capaian = Jumlah realisasi layanan data dan informasi di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera I Target output per tahun sebagai berikut: 2025 : - layanan 2027 : 1 layanan 2029 : 1 layanan 2026 : 1 layanan 2028 : 1 layanan Total : 4 layanan		
				OK 8 Jumlah Layanan Data dan Informasi <i>(Ditjen Perumahan Perdesaan)</i>	Dihitung dari realisasi jumlah layanan data dan informasi oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera I Capaian = Jumlah realisasi layanan data dan informasi di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera I Target output per tahun sebagai berikut: 2025 : - layanan 2027 : 1 layanan 2029 : 1 layanan 2026 : 1 layanan 2028 : 1 layanan Total : 4 layanan		

SASARAN STRATEGIS / SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA / SATUAN		OUTPUT KEGIATAN	METODE PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
				OK 9 Jumlah Layanan Data dan Informasi <i>(Ditjen Perumahan Perkotaan)</i>	Dihitung dari realisasi jumlah layanan data dan informasi oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera I Capaian = Jumlah realisasi layanan data dan informasi di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera I Target output per tahun sebagai berikut: 2025 : - layanan 2027 : 1 layanan 2029 : 1 layanan 2026 : 1 layanan 2028 : 1 layanan Total : 4 layanan	Non Kumulatif	Internal
				OK 10 Jumlah Layanan BMN <i>(Ditjen Kawasan Permukiman)</i>	Dihitung dari realisasi jumlah layanan BMN oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera I Capaian = Jumlah realisasi layanan BMN di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera I Target output per tahun sebagai berikut: 2025 : - layanan 2027 : 1 layanan 2029 : 1 layanan 2026 : 1 layanan 2028 : 1 layanan Total : 4 layanan	Non Kumulatif	Internal
				OK 11 Jumlah Layanan BMN <i>(Ditjen Perumahan Perkotaan)</i>	Dihitung dari realisasi jumlah layanan BMN oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera I Capaian = Jumlah realisasi layanan BMN di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera I Target output per tahun sebagai berikut: 2025 : - layanan 2027 : 1 layanan 2029 : 1 layanan 2026 : 1 layanan 2028 : 1 layanan Total : 4 layanan	Non Kumulatif	Internal
				OK 12 Jumlah Layanan Reformasi Kinerja	Dihitung dari realisasi jumlah layanan reformasi kinerja oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera I	Non Kumulatif	Internal

SASARAN STRATEGIS / SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA / SATUAN		OUTPUT KEGIATAN		METODE PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
					(Ditjen Perumahan Perkotaan)	Capaian = Jumlah realisasi layanan reformasi kinerja di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera I Target output per tahun sebagai berikut: 2025 : - layanan 2027 : 2 layanan 2029 : 2 layanan 2026 : 2 layanan 2028 : 2 layanan Total : 8 layanan		



KEMENPKP
REPUBLIK INDONESIA